

SKRIPSI

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS EFEKTIFITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAKAN TAX EVASION PADA KPP PRATAMA PALOPO

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

DWI INDRYANI PUJianto
A31110303



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS EFEKTIFITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAKAN TAX EVASION PADA KPP PRATAMA PALOPO

disusun dan diajukan oleh

DWI INDRYANI PUJianto
A31110303

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Haliah, SE., M.Si., Ak.
NIP. 196507311991032002

Drs. M. Christian, M.Si., Ak.
NIP. 195811101987101001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19650925199002001

PRAKATA

Puji dan Syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah SWT, karunia keilmuan, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan oleh-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal pembuatan sampai pada perampungan skripsi ini. Selain itu, terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada Ibu Dr. Hj. Haliah, SE., M.Si., Ak., dan Drs. M. Christian, M.Si., Ak, sebagai dosen pembimbing yang ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Armadari, sebagai pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo, atas izin yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada kantor Beliau. Kepada Bapak Gunawan Sudaharto, sebagai kepala sub bagian umum, beserta seluruh staff yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden, dan pemberian informasi yang sangat besar dalam penelitian ini.

Terakhir, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ayah dan Ibu atas doa, pengorbanan dan keikhlasan merawat peneliti. Saudara-saudara peneliti terima kasih atas dukungan kalian, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian berjalan. Kepada sahabat-sahabatku, terkhusus kepada saudara Bahri, atas segala bantuan, motivasi dan bimbingan selama peneliti menyusun skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat amal atas kebaikan dari-Nya, atas semua bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan.

Peneliti sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, walaupun telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Oleh sebab itu, peneliti sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 21 September 2014

Peneliti

ABSTRAK

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Sanksi Pajak dalam Keterkaitanya dengan Tindakan Tax Evasion pada KPP Pratama Palopo

The Perception Of An Individual Taxpayer on The Effectiveness Of The Self Assesment System and Tax Penalty Implementation in Its Linkage with Tax Evation Measures in Palopo Tax Services Office

Dwi Indryani Pujianto
Haliah
M.Christian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system*, penerapan sanksi pajak, tindakan *tax evasion* dan keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas efektifitas pelaksanaan *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Untuk mengetahui keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion* digunakan pengujian statistik sebagai berikut, analisis korelasi berganda, analisis korelasi parsial, koefisien determinasi parsial dan uji hipotesis yang memakai aplikasi *SPSS 22.0 for windows*. Hasil penelitian yang didapat berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berkaitan signifikan dengan tindakan *tax evasion*.

Kata kunci: *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, *Tax Evasion*, Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

This study aims to determine the perception of an individual taxpayer on self-assessment system implementation, the application of tax penalties, tax evasion measures and its linkages between individual taxpayer perception on the effectiveness of self-assessment system, and tax penalties on tax evasion measures in Palopo Tax Services Office. The research method used is descriptive and verification methods. To determine the relationship between the perception of an individual taxpayer on the self-assessment tax system and the tax penalties implementation on tax evasion measures, the following statistical tests, multiple correlation analysis, partial correlation analysis, partial determination coefficient and hypothesis testing using SPSS 22.0 for Windows were used. The result showed that the self-assessment system and the tax penalties implementation significantly correlated with tax evasion measures.

Keywords: Self-Assessment System, Tax Penalties, Tax Evasion, Individual Taxpayer Perception

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Wajib Pajak	12
2.1.4 Subjek Pajak	13
2.1.5 Subjek Pajak Orang Pribadi.....	17
2.1.5.1 Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	19
2.1.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).	23
2.1.6 Pengertian Efektifitas	25
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	27
2.1.8 Self Assessment System.....	28
2.1.9 Hambatan dalam Pemungutan Pajak.....	30
2.1.9.1 Tax Evasion.....	32
2.1.9.2 Penyebab Tax Evasion.....	34
2.1.10 Sanksi Pajak.....	36
2.1.11 Hubungan Self Assessment System dan SanksiPajak Terhadap Tax Evasion	41
2.2 Kerangka Pemikiran	42
2.3 Penentuan Hipotesis	46
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	48
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.3 Populasi dan Sampel	49
3.3.1 Populasi	49
3.3.2 Penarikan Sampel.....	49
3.4 Jenis dan Sumber Data	50

3.4.1 Data Primer	50
3.4.2 Data Sekunder	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	51
3.7 Instrumen Penelitian	54
3.8 Analisa Data	55
3.8.1 Analisis Kualitatif	56
3.8.2 Analisis Kuantitatif	58
3.9 Uji Validitas dan Realibilitas	62
3.9.1 Uji Validitas	62
3.9.2 Uji Realibilitas	63
3.10 Uji Hipotesis	64
3.10.1 Uji Statistik Secara Simultan (F)	64
3.10.2 Uji Statistik Secara Parsial (t)	65
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	67
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Palopo	67
4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan KPP Pratama Palopo	68
4.1.3 Aspek-aspek Kegiatan di KPP Pratama Palopo..	71
4.2 Pembahasan	73
4.2.1 Karakteristik Responden	73
4.2.2 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System pada KPP Pratama Palopo	77
4.2.3 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Sanksi Pajak pada KPP Pratama Palopo	88
4.2.4 Tindakan Tax Evasion pada KPP Pratama Palopo	93
4.2.5 Analisis Kuantitatif	101
4.2.6 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas.....	105
4.2.7 Uji Hipotesis	107
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	111
 DAFTAR PUSTAKA	113
 LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	19
2.2 PTKP Laki-laki Tidak Kawin, dan Wanita Kawin/Tidak.....	24
2.3 PTKP Laki-laki Kawin, dan Istri Tidak Bekerja.....	24
2.4 PTKP Laki-laki Kawin, dan Istri Bekerja/Usaha.....	25
3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian	52
3.2 Scoring Untuk Jawaban Kuisioner	54
3.3 Kriteria Skor Jawaban Responden Berdasarkan Persentase Skor Aktual	57
3.4 Penafsiran Koefisien Korelasi	61
4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia	75
4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	76
4.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Proses Pendaftaran	78
4.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menghitung Pajak	80
4.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Membayar Pajak	82
4.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Melaporkan Pajak	83
4.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Fiscus	85
4.9 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Fiscus	86
4.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Self Assessment System Pada KPP	

Pratama Palopo	88
4.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Administrasi	89
4.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pidana	91
4.13 Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Sanksi Pajak.....	92
4.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Tidak Menyampaikan SPT	93
4.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyampaikan SPT dengan Tidak Benar	95
4.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai TidakMendaftara (Menyalahgunakan NPWP).....	96
4.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipungut	98
4.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Berusaha Menyuap Fiscus	99
4.19 Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Tax Evasion	101
4.20 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	102
4.21 Korelasi Antara Variabel X1 dan X2 Terhadap Variabel Y	104
4.22 Koefisien Determinasi	105
4.23 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Kuisisioner Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	105
4.24 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Kuisisioner Pelaksanaan Sanksi Pajak.....	106
4.25 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Kuisisioner Pelaksanaan <i>Tax Evasion</i>	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran	45
3.1 Regresi Berganda	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Struktur Organisasi KPP Pratama Palopo	115
2. Daftar Responden Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Palopo	116
3. Daftar Responden Fiscus KPP Pratama Palopo	119
4. Kuisioner	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan anggaran tidak sedikit untuk membiayai pembangunan yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan penting dalam menghadirkan sumber-sumber pendapatan negara demi kelangsungan pembangunan dan roda ekonomi masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar dan krusial adalah pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sangat penting dan perlu mendapat pengelolaan yang baik, hal ini tidak lepas dari kesadaran wajib pajak (masyarakat) untuk membayar pajak, tidak menghambat ataupun melakukan penyelewengan terhadap mekanisme pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2009, dikatakan bahwa pajak sebagai kontribusi orang pribadi maupun badan kepada negara, walaupun bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tetapi ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, adalima jenis pajak di Indonesia, yaitu.

1. Pajak Penghasilan,
2. Pajak Pertambahan Nilai,
3. Pajak Bumi dan Bangunan,

4. Bea Materai, dan
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penelitian ini lebih menekankan pada pajak penghasilan, yakni pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan yang dimaksud dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya.

Penghasilan dari kegiatan usaha tersebut, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013). Sedangkan wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas yang dimaksud, seperti; dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan pajak penghasilannya.

Sumitro (2008:7), menyebutkan unsur-unsur pajak yaitu.

- a. Ada masyarakat (kepentingan umum),
- b. Ada undang-undang,
- c. Pemungut pajak,
- d. Subjek pajak- wajib pajak,
- e. Objek pajak – *tatbestand*,
- f. Surat ketetapan pajak (fakultatif).

Salah satu unsur-unsur pajak adalah pemungut pajak. Sejalan dengan hal tersebut, dan sehubungan dengan sistem pemungutan pajak,

maka terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2009:17) yang sempat berlaku di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *with holding tax system*, dan *self assessment system*. Dalam hal ini, penulis menekankan pada sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu sistem *self assessment*, yang dimulai tahun 1983 sampai sekarang.

System *self assessment* diharapkan mampu mendatangkan penerimaan pajak yang optimal. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak tersebut, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan begitu pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik.

Ironisnya, pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) hingga pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). Kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama (akuntansiumkm.wordpress.com, 18 February 2010).

Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dan sosialisasi yang maksimal kepada wajib pajak mengenai pelaksanaan sistem *self assessment*, sehingga sumber dana yang akan dikenakan pajak, maupun yang telah diperoleh dari sektor pajak penggunaanya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ataupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terjadinya tindakan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menggelapkan atau merekayasa pajak, antara lain; kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk. Rahayu (2010:140-142).

Fenomena yang terjadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Palopo, umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Salah satu fenomena tersebut, yaitu pada tahun 2011 Kantor pelayanan pajak Pratama Palopo menemukan ratusan pengemplang pajak (membayar pajak tidak sesuai jumlah pajak yang seharusnya dibayar), baik orang pribadi maupun perusahaan di wilayah Luwu Raya dan Tana Toraja. Kepala KPP Pratama Palopo Dionysius Lucas Hendrawan menolak mengungkapkan pihak yang masuk daftar pengemplang pajak itu. Tunggakan pajak yang terdata meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PBB. "Tunggakan terbesar pajak pertambahan nilai terutama dari perusahaan," ungkap kepala KPP Pratama Palopo tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo akan berkonsentrasi menyelesaikan masalah tunggakan pajak ini karena sangat berpotensi merugikan negara mencapai puluhan miliar. Untuk menyelamatkan keuangan negara, KPP Pratama menyurati para penunggak pajak sebanyak dua kali dalam beberapa bulan, melakukan penyitaan, atau dilaporkan kepada aparat berwajib untuk ditindak tegas. (Harian Seputar Indonesia. 26 Mei, 2011).

Kemudian, hasil survey dari Tim Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis Indonesia *Corruption Watch* (2000) menyebutkan bahwa dari pandangan Dirjen pajak sendiri, *self assessment* sebenarnya juga mempunyai beberapa kekurangan seperti di bawah ini.

- a) Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya WP perseorangan. Karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak,
- b) Ketidaksuksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun WP sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut,
- c) Untuk memaksa WP berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Namun, sistem *self assessment* tetap dilaksanakan.

Beberapa gambaran diatas mengenai kelemahan pelaksanaan *self assessment system*, maka sanksi dari aturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Pemberian sanksi kepada wajib pajak dan pejabat yang berwenang sesuai aturan yang ada, diharapkan mampu meminimalisir, bahkan mencegah

praktek-praktek *tax evasion*/penyelundupan pajak, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu. Jelas ini merugikan negara, dan mempengaruhi laju pembangunan bangsa. Olehnya itu, sanksi yang tegas dari para penegak hukum sangat diharapkan.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Rezky Suhairi pada tahun 2011 di KPP Pratama Bandung yang berjudul: “Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Populasi penelitiannya dengan jumlah responden 46 responden dengan taraf kesalahan 5%, dan jumlah sampel yang diambil sebesar 23 dari 46 responden. Sampling yang digunakan metode *probabilty sampling* jenis sampling acak sederhana (random). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian, serta adanya penambahan variabel sanksi.

Beberapa penjelasan tersebut di atas mengenai pajak, dan masih banyaknya kasus penggelapan pajak yang ditemukan oleh kantor pelayanan pajak Pratama Palopo, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini, dengan mengambil judul, “Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Efektifitas *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan *Tax Evasion* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi atas penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Palopo?

2. Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak yang berlaku pada KPP Pratama Palopo?
3. Bagaimana tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo?
4. Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi atas penerapan *self assessment system* dalam kaitannya dengan sanksi pajak dan tindakan *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini telah tercapai tujuan yang diantaranya adalah.

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi atas penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Palopo?
2. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak yang berlaku pada KPP Pratama Palopo?
3. Untuk mengetahui tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo?
4. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi atas penerapan *self assessment system* dalam kaitannya dengan sanksi pajak dan tindakan *Tax Evasion*?

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk operasional dan pengembangan ilmu sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan penelitian sebagai kegunaan teoretis adalah.

1. Untuk peneliti

Penelitian ini dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai *self assessment system* dan *tax evasion* serta mengetahui bagaimana aplikasinya di kehidupan nyata

sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

2. Untuk instansi

Hasil penelitian ini, dapat memberikan pandangan dan masukan kepada KPP Pratama Palopo mengenai persepsi wajib pajak atas pelaksanaan *self assessment system*, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tindakan *tax evasion*.

3. Untuk peneliti lain

Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu *self assessment system dan sanksi pajak* dalam kaitannya dengan *tax evasion*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian sebagai kegunaan praktis, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi pelaksanaan *self assessment system*, undang-undang perpajakan dalam hal ini efektifitas sanksi yang berlaku, dan tentang *tax evasion* sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan penelitian, dan kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 Tahun 2009).

Selain itu, beberapa pengertian pajak berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut.

- a) Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja, adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Pudyamoko, 2008:2)
- b) Soemitro mengatakan bahwa “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*”. (Suandy, 2008:2)
- c) Menurut Smeets, (Pudyamoko, 2008:4) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan.

- 1). Pajak adalah kewajiban rakyat kepada negara dan bersifat memaksa,
- 2). Pajak merupakan sebagian kekayaan yang diserahkan untuk membiayai pengeluaran rutin negara,
- 3). Rakyat sebagai wajib pajak tidak menerima imbalan jasa secara langsung dari negara, tapi berupa pembangunan untuk kesejahteraan umum.

Saat ini, ada lima jenis pajak yang dikelola di Indonesia, yaitu; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan kepada wajib pajak inilah yang diharapkan membiayai pengeluaran negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak yang telah dikemukakan sebelumnya, dan menurut Pudiatmoko (2008:16) pada dasarnya ada dua fungsi utama dari pemungutan pajak yaitu.

1. Fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara)

Negara dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan maka diperlukan dana yang tersedia dalam kas negara, untuk itulah pemerintah mengambil berbagai kebijaksanaan guna memasukkan uang ke dalam kas negara, dan salah satu sumber utama pemasukan keuangan negara adalah penerimaan dari sector pajak.

2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial maupun budaya. Jadi selain fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara atau untuk mengisi kas semata-mata untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur. Sehubungan dengan fungsi mengatur, pajak digunakan untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.3 Wajib Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pudiatmoko dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak (2008:21) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sebagai contoh seseorang yang tinggal di Indonesia memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.

Perlu diingat tidak semua penghasilan memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak, misalnya menyangkut besarnya penghasilan itu sendiri. Apabila penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka orang yang mendapatkan penghasilan itu dapat dikatakan

telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan disebut wajib pajak.

2.1.4 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan, yang telah memenuhi syarat subjektif. Untuk memenuhi subjek pajak, syarat subjektif harus dipenuhi yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di Indonesia, dan sebagainya, walaupun tidak tinggal dan berkedudukan di Indonesia, maka memiliki kekayaan di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. (Pudyatmoko, 2008:20).

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik yang termasuk dalam pengertian subjek pajak, dapat dibagi kedalam empat jenis subjek pajak, seperti penjelasan pada lembaran berikutnya, yaitu;

a. Orang pribadi

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang tata cara perpajakan menyebutkan bahwa subjek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, termasuk bentuk usaha tetap (*permanent establishment*). Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Kedudukan orang pribadi sebagai objek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menjadi subjek pajak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Pengertian badan memang agak berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dalam hukum keperdataan, bahwa badan sebagai subjek hukum haruslah berbadan hukum seperti PT, yayasan, dan koperasi. Sementara itu dalam hal pajak yang dimaksud sebagai badan hukum, bentuk-bentuk CV, firma, kongsi, persekutuan, atau perkumpulan orang pun dapat menjadi badan.

Undang-Undang no. 16 Tahun 2009 (Pasal 1:3), disebutkan bahwa badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Bentuk usaha tetap dapat berupa; tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan, proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung risiko di Indonesia.

Suatu badan usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat tetap (permanen) dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek pajak juga dapat dibagi kedalam dua golongan, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek pajak dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri yang dimaksud dalam hal ini, adalah salah satu di bawah ini.

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak (orang pribadi yang tinggal di Indonesia).

b. Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak luar negeri, adalah salah satu di bawah ini.

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Beberapa penjelasan subjek pajak di atas dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka penulis akan membahas lebih rinci mengenai subjek pajak orang pribadi dalam sub bab berikutnya.

2.1.5 Subjek Pajak Orang Pribadi

Subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kedudukan orang pribadi sebagai objek pajak

dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

Sistem *self assessment*, memberikan kewajiban pada wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (*NPWP*). Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah.

- a. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
- b. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (*PTKP*) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya,
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
- d. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan,
- e. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi *formulir* pendaftaran dan melampirkan

persyaratan administrasi. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, Wajib pajak orang pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal pajak www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (*PKP*) dan kepadanya akan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (*NPPKP*).

Mengenai konteks orang pribadi, maka penghasilan dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. Dalam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari Rp.4,8 miliar setahun, maka wajib pajak dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Selain itu wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek, juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan pajak penghasilannya.

2.1.5.1 Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

Penghasilan kena pajak (PhKP) adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi yang berlaku saat ini di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada tabel 21 di bawah ini.

Tabel 2.1 Pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: www.pajak.go.id

a. Penghasilan wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan bebas

Wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas, umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan anatara lain; pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, mereka yang membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika mereka hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di kantor akuntan publik, maka mereka tidak termasuk WPOP yang menjalankan pekerjaan bebas.

b. Penghasilan wajib pajak orang pribadi dari kegiatan usaha

Penjelasan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka penghasilan dari kegiatan usaha yang dimaksud, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak.

Bagi sebagian orang pribadi yang memiliki usaha kewajiban membuat pembukuan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan selain karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai akuntansi juga kurang efisien jika harus mempekerjakan karyawan hanya untuk membuat pembukuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 14 ayat (2) tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi boleh menghitung penghasilan netto dengan

menggunakan norma penghitungan penghasilan netto sehingga tidak perlu membuat pembukuan tetapi cukup hanya membuat pencatatan.

Penghasilan netto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase norma penghitungan penghasilan netto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun. Dalam menghitung besarnya PPh yang terutang oleh WPOP, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari penghasilan netto.

c. Penghitungan pajak penghasilan bagi WP orang pribadi

Penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan menggunakan norma penghitungan, dan melalui pembukuan.

1. Menggunakan norma penghitungan

Bagi WPOP yang tidak memilih untuk menyeleggarakan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan penghasilan netto atau pekerjaan bebasnya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Wajib Pajak OP yang diperkenankan menggunakan norma penghasilan netto adalah WP yang memiliki omset atau peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

Bagi WPOP yang menggunakan norma penghitungan, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memberitahukan

mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan netto kepada direktur jenderal pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WPOP tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Jika WPOP tidak melakukan pemberitahuan, maka dia dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Berikut ketentuan lama WPOP yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. 1.800.000.000,00 atau lebih dalam 1 tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 dalam 1 tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.
3. Wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan netto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.

Ketentuan tersebut di atas telah diubah melalui UU perpajakan yang baru yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 maka sejak 1 Januari 2009 batasan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan berubah dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 menjadi Rp 4.800.000.000.

2. Menggunakan pembukuan

Bagi WPOP yang memilih menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan nettonya tidak lagi dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, melainkan berdasarkan pembukuan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap WPOP yang tidak memberitahukan penggunaan norma penghitungan penghasilan netto kepada direktur jenderal pajak sehingga dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah;

- Pengisian SPT,
- Penghitungan penghasilan kena pajak,
- Penghitungan PPN dan PPnBM,
- Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

2.1.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi

jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena pajak penghasilan (PPH) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, undang-undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp 24.300.000.

Lebih jelasnya, bisa kita lihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 PTKP Laki-laki tidak kawin, dan wanita kawin/tidak kawin

STATUS	TK/0	TK/1	TK/2	TK/3
Wajib Pajak (Laki-laki tidak kawin & Wanita)	24.300.000	26.325.000	28.350.000	30.375.000

Sumber. www.pajak.go.id

Penjelasan :

- Status Wanita meskipun sudah kawin tetap mempunyai PTKP tidak kawin kecuali dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja (dari Instansi terkait/kelurahan)
- TK/0 = Tidak Kawin tidak ada tanggungan (24.300.000)
- TK/1 = Tidak Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan (24.300.000+2.025.000)
- TK/2 = Tidak Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan (24.300.000+2.025.000 + 2.025.000)
- TK/3 = Tidak Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan (24.300.000+2.025.000 + 2.025.000 + 2.025.000)

Tabel 2.3 PTKP laki-laki kawin, dan istri tidak bekerja

STATUS	K/0	K/1	K/2	K/3
Istri Tdk Kerja/ Tdk Usaha	26.325.000	28.350.000	30.375.000	32.400.000

Sumber. www.pajak.go.id

Penjelasan Tabel 2.3.

- K/0 = Kawin tidak ada tanggungan (24.300.000 + 2.025.000)
- K/1 = Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan
(24.300.000+2.025.000+2.025.000)
- K/2 = Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan
(24.300.000+2.025.000+2.025.000+2.025.000)
- K/3 = Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan
(24.300.000+2.025.000+2.025.000+2.025.000+2.025.000)

Tabel 2.4 PTKP laki-laki kawin, istri bekerja/usaha

STATUS	K/I/0	K/I/1	K/I/2	K/I/3
Istri Kerja/Usaha	50.625.00	52.650.000	54.675.000	56.700.000

Sumber. www.pajak.go.id

Penjelasan;

- PTKP untuk isteri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami hanya yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan/atau isteri yang usaha (penghasilan digabung dengan penghasilan suami)
- K/I/0 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha tidak ada tanggungan
(24.300.000+24.300.000+2.025.000)
- K/I/1 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 1 (satu) tanggungan
(24.300.000+24.300.000+2.025.000+2.025.000)
- K/I/2 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 2 (dua) tanggungan
(24.300.000+24.300.000+2.025.000+2.025.000+2.025.000)
- K/I/3 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 3 (tiga) tanggungan
(24.300.000+24.300.000+2.025.000+2.025.000+2.025.000+2.025.000)

2.1.6 Pengertian Efektifitas

Efektivitas merupakan unsur pokok dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Sumber daya yang dimaksud, meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Sejalan dengan penelitian yang penulis angkat, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas dalam hal ini adalah sejauh mana KPP Pratama Palopo mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai kantor pelayanan yang membantu masyarakat menyelesaikan kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Pengukuran Efektifitas

Duncan yang dikutip oleh Steers (1985:53) dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut;

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Jika dipandang dari sudut kepemimpinan, sesuai penjelasan diatas, dan sejalan dengan penelitian yang penulis angkat, maka seorang kepala/pimpinan kantor harus mampu mengelola kantor yang dipimpinnya dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Sebaliknya, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dalam pembahasan ini tidak hanya pada masalah waktu pungut saja, tetapi juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak. Menurut Waluyo (2009:17), berikut sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia:

1. *Official assessment system*

Adalah sistem pemungutan pajak yang keseluruhan proses pelaksanaanya, mulaidari penetapan nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga timbulnya pajak terutang melalui penerbitan Surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh aparat pemungut pajak (*fiskus*). Ciri-ciri sistem ini adalah;

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
2. Wajib pajak bersifat pasif,

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiscus.

2. *With holding tax system*

Sistem *With holding tax* adalah sistem pemungutan yang melibatkan pihak ketiga dalam memotong atau memungut pajak yang harus dikeluarkan setiap warga negara. Sistem ini dilaksanakan mulai tahun 1984.

3. *Self assessment system*

Sistem *self assessment* umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahkan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini subjek pajak/wajib pajaknya relatif terbatas, tidak seperti dalam pajak bumi dan bangunan. Pudyatmoko, (2008:79)

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, namun untuk beberapa jenis pajak diterapkan pula *with holding tax* untuk pemotongan/pemungutan pajak dari penghasilan tertentu dan *official assessment* untuk Surat ketetapan pajak dan pajak bumi dan bangunan. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai *self assessment system*.

2.1.8 *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Diana dan Setiawati, 2009:1)

a. Pelaksanaan *self assessment system*

Sehubungan dengan pelaksanaan *self assessment system* pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Rahayu (2010:101-102) antara lain;

- a) Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- b) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian dengan baik & benar.
- c) Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos
- d) Melaporkan penyeteroran tersebut kepada direktur jenderal pajak

b. Ciri-ciri *self assessment system*:

Adapun ciri-ciri *self assessment system*, adalah;

- 1) Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
- 3) Fiscus atau pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Penulis berpendapat dari hasil uraian di atas, bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang akan dibayar sesuai persentase aturan yang

ada, dan pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang ditetapkan sendiri oleh wajib pajak.

2.1.9 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam hal ini *self assessment system*, tidak selamanya berjalan sesuai harapan, kadang mengalami hambatan dari masyarakat (wajib pajak). Pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang membebani, sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat.

Apabila dipandang dari kepentingan individu yang tidak sadar akan kewajiban dan tanggung jawab hidup berbangsa dan bernegara, tentu akan menyebabkan orang merasa berat untuk memenuhi kewajiban pajak itu dan cenderung melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap pajak menurut Suandy (2008:21) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan Aktif.

a. Perlawanan pasif

Perlawanan pajak secara pasif, berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan. Bentuk perlawanan ini dilakukan oleh masyarakat secara pasif, tetapi memberikan hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak.

Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, seperti adanya kebiasaan masyarakat desa yang

menyimpan uang di rumah atau membeli emas, bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi belum terbiasa dengan perbankan.

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain;

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan pajak secara aktif, merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap *fiscus* dengan tujuan menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif ada dua, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*.

1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotong-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2. *Tax evasion* (penggelapan pajak)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memaparkan lebih jauh masalah *tax evasion*.

2.1.9.1 Tax Evasion

Susan M. (Erly Suandy, 2008:7) berpendapat bahwa;

“Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. the distinction, however, is not always easy. some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earned in low-tax foreign jurisdictions ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a low rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.”

Berikut definisi mengenai *tax evasion* berdasarkan pendapat para pakar, antara lain;

- a) Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
- b) Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang.
- c) Mardiasmo (2008:9) *tax evasion* adalah “usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”

Definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, *tax evasion* merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang (*irregular acts*) dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

Oldman (Zain, 2008:51), memaparkan bahwa penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh;

- a) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- c) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d) Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Zain (2008:51), menjelaskan bahwa sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut.

- a) Tidak menyampaikan SPT,
- b) Menyampaikan SPT dengan tidak benar,
- c) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP,

- d) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong,
- e) Berusaha menyuap fiskus.

2.1.9.2 Penyebab *Tax Evasion*

Rahayu (2010:149), mengatakan “selain faktor psikologis wajibpajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajakberusaha menghindari dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskusyang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”. Adapun penyebab terjadinya tindakan *tax evasion*, adalah;

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan oranglain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungansekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka salingmengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisilingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasiuntuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan.Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karenadengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasadirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentu merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja, jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Pembebanan tarif yang tinggi, menjadikan masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerjakeras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak membingungkan, membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar 'lari' dari kewajiban membayar pajak.

2.1.10 Sanksi Pajak

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessments system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Sistem *self assessment* dapat dijalankan oleh pemerintah, dengan catatan setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasi sistem tersebut. Agar

pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak mengandung unsur pemaksaan jika dipandang dari sudut pandang yuridis. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan, sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Menurut Aviantara, Ada dua macam sanksi perpajakan,

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari;

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa bunga yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak

yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai Pasal 40 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, selama sepuluh tahun.

Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Adapun sanksi pidana terdiri dari;

1. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan adalah 1 (satu) tahun. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan dibandingkan dengan para tahanan penjara. Pada dasarnya tidak ada pembagian kelas-kelas pada tahanan kurungan, dan kurungan ini dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2. Pidana penjara

Sanksi pidana biasa terjadi karena adanya tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum pidana penjara ialah seumur hidup, dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat. Tahanan penjara dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan hukuman ini tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Pada Undang-Undang perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada. (Sumber: aris-aviantara.blogspot)

2.1.11 Hubungan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Tax Evasion

Sebelumnya telah dijlaskan bahwa tax evasion merupakan bentuk perlawanan wajib pajak yang menghambat pemungutan pajak, dalam hal ini mampu menghambat efektifitas pelaksanaan *self assessment system*. Untuk itu perlu pengelolaan yang baik dari instansi yang berwenang dalam hal ini kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama sehingga tax evasion di Indonesia mampu mendapatkan solusi atas tindakan tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan self assessment Systemdi Indonesia

dibutuhkan aturan yang jelas dengan segala sanksi yang melekat bersamanya dalam hal ini Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, telah diatur mekanisme perpajakan yang ada di Indonesia, dimana terdapat pula sanksi-sanksi pajak didalamnya.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang yang telah dirancang untuk mengaturmekanisme perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Dari pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya.

Penulis dapat menarik kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas, bahwa hubungan antara self assesment system, sanksi pajak dan *tax evasion*, yaitu untuk mendukung pelaksanaan *self ssessment system*, sangat diperlukan sanksi (sanksi pajak) yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak (*tax evasion*), sehingga pemungutan pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, maka pemerintah harusmenciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjaditeknis pelaksanaan dalam proses

pemungutan pajak di Indonesia, diatur oleh Dirjen pajak. Sistem perpajakan mencakup tiga bagian, yaitu kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan.

Kebijakan perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam bidang perpajakan. Hukum perpajakan adalah seperangkat aturan yang mengatur teknis pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya. Sedangkan administrasi perpajakan berisikan tata cara pemungutan pajak yang sistematis.

Salah satu unsur sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak adalah administrasi perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yang pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak.

Self assessment system sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang proses perhitungan, hingga pelaporannya dilakukan oleh wajib pajak. Namun pelaksanaan *self assessment system* tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Ironisnya, *Self assessment system* dapat menyebabkan terjadinya tindakan *tax evasion*, terlebih dengan penerapannya di Indonesia yang masih disertai dengan rendahnya kepatuhan pajak oleh masyarakat. Hal tersebut makin memperkuat indikasi terjadinya penggelapan pajak di Indonesia.

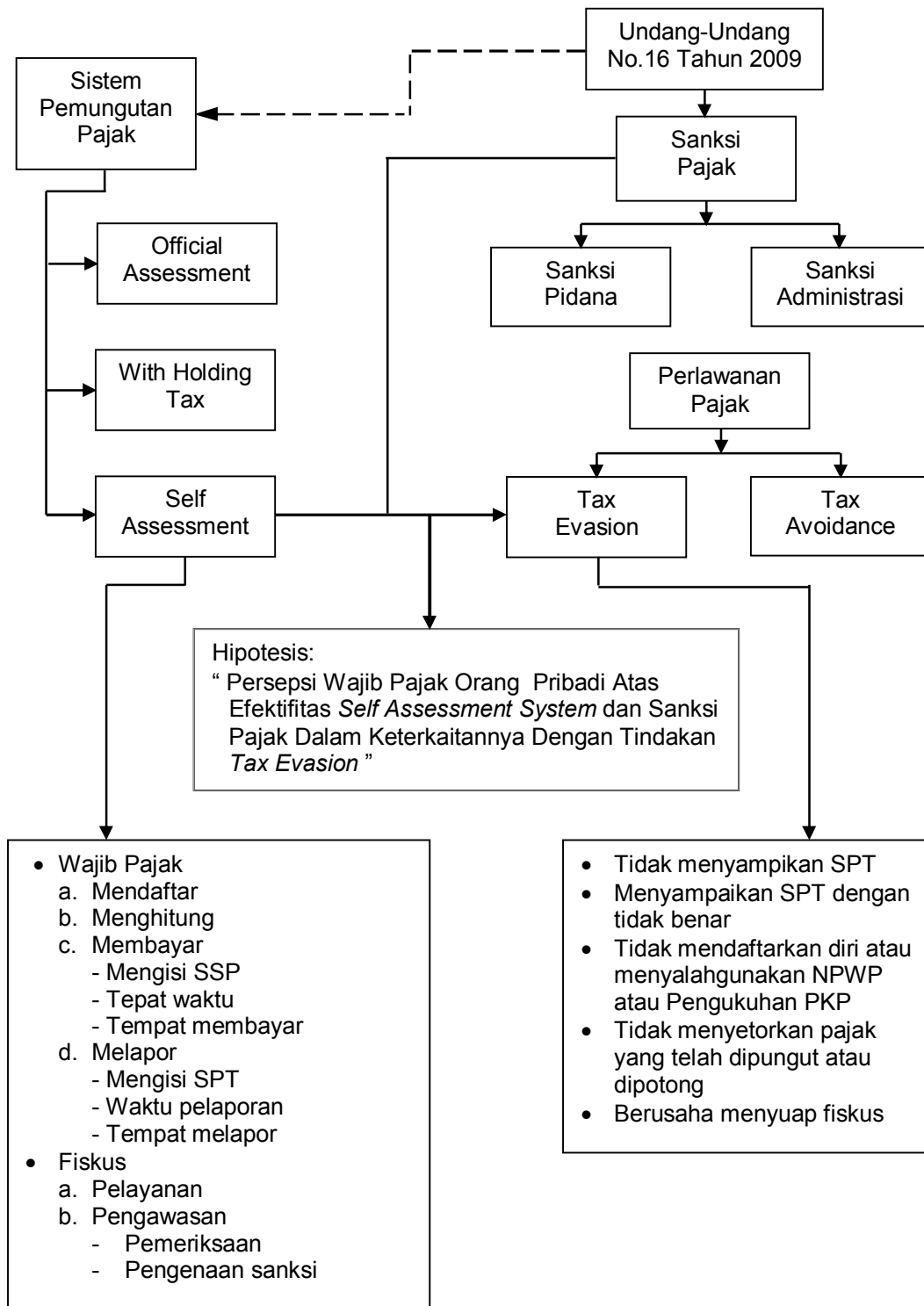
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Devano dan Rahayu (2006:81), "Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi

perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.”

Andai saja kepatuhan pajak telah tertanam pada diri setiap wajib pajak, maka pelaksanaan *self assessment system* akan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak rendah, pelaksanaan *self assessment system* tidak akan berlangsung mulus dan kemungkinan besar terjadi *tax evasion*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam skema kerangka pemikiran, seperti pada gambar 2.1, di lembaran berikutnya.

Gambar 2.1 Skema kerangka pemikiran



2.3 Penentuan Hipotesis

Sistem *self assessment*, memberikan kewajiban pada wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Namun pelaksanaannya tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Ironisnya, *system* ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan *tax evasion*, terlebih dengan penerapannya di Indonesia yang masih disertai dengan rendahnya kepatuhan pajak oleh masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan penerapan sanksi pajak yang tegas.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Rezki Suhairi (2011) yang berjudul: "Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa meskipun secara keseluruhan pelaksanaan *Self Assessment System* berjalan cukup, tetapi ada beberapa hal yang pelaksanaannya sudah dianggap baik seperti pada proses pendaftaran dan pelayanan fiskus. Sedangkan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori cukup. Artinya ditinjau dari pelaporan SPT, kepemilikan NPWP/SPPKP, pelaksanaan wewenang oleh pihak ketiga selaku pemungut/pemotong pajak dan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih memiliki kesadaran yang rendah.

Judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax*

evasion. Dari judul tersebut, terdapat dua variabel independen (*self assessment system* dan sanksi pajak) dan satu variabel dependen (*tax evasion*), maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut;

$H_0 : = 0$, Pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap tindakan *tax evasion*.

$H_a : \neq 0$, pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tindakan *tax evasion*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, dengan menekankan pada pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Menggunakan metode deskriptif, karena dalam pelaksanaannya, penelitian ini meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini juga menggunakan metode verifikatif karena penelitian ini untuk menguji suatu teoretis dan hasil penelitian dari Rezki Suhairi, sehingga hasil yang diperoleh akan memperkuat atau menggugurkan teoretis dan hasil penelitian sebelumnya.

Selanjutnya untuk menganalisis data tersebut, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden mengenai *self assessment system*, sanksi pajak, dan tindakan *tax evasion* melalui kuesioner. Penelitian ini juga menggunakan Analisis Kuantitatif untuk menguji kaitan antara pelaksanaan *Self Assessment System*, dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion*.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo yang berlokasi di Jl. Andi Jemma, no.131, Kota Palopo. Lokasi ini berjarak sekitar 396 km dari Kota Makassar. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo meliputi 6 kabupaten/kota, yaitu; Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. Pada penelitian ini,

peneliti hanya mengambil wajib pajak yang terdaftar pada wilayah kerja kota Palopo.

Peneliti tertarik memilih lokasi ini, karena banyaknya informasi awal melalui koran dan media sosial lainnya mengenai banyaknya ketimpangan dan penggelapan pajak yang terjadi di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2014.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo dan masih tergolong wajib pajak efektif 2013. Alasan pemilihan populasi ini karena wajib pajak orang pribadi efektif, merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, dan penelitian ini berfokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.3.2 Penarikan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan cara *simple random sampling*. Teknik ini adalah cara yang paling sederhana (simple), karena Sampel diambil secara acak. tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Teknik ini memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel.

Berdasar pada teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti, maka sampel yang diambil oleh peneliti adalah wajib pajak pribadi yang memiliki tunggakan pajak selama satu tahun

terakhir (tahun 2013) yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo, dengan formulasi seperti rumus di bawah ini.

$$n = \frac{N}{(1 + N_e^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilansampel dalam penelitian ini di ambil nilai e = 5%.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer pada penelitian ini, diambil dari kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi sebagai responden yang dijadikan sampel, untuk mengetahui tanggapan tentang penelitian yang diteliti. Selain itu data primer juga meliputi dokumen-dokumen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo berupa struktur organisasi, dan data-data statistik mengenai jumlah pegawai dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini, yaitu data-data yang diambil dari literatur, artikel, dan catatan-catatan atau arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang relevan dan akurat sehubungan dengan penelitian yang dikumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Studi kepustakaan (*library study*) yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai bahan referensi dan laporan penelitian yang dianggap relevan untuk mendapatkan landasan teoretis.
2. Penelitian lapangan, yaitu cara pengumpulan data yang langsung pada obyek penelitian yang meliputi ;
 - a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog atau komunikasi langsung dengan responden dan informan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
 - c. Kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan rumusan masalah penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melihat persepsi wajib pajak pribadi atas efektifitas *self assessment system* dan sanksi pajak dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion*, maka variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat).

a. Variabel independen (X).

Variabel independen pada penelitian ini adalah;

1. *Self assessment system* (X_1)

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dan ini dilakukan sendiri oleh wajib pajak

2. Sanksi pajak (X_2)

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak apabila kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan.

b. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindakan *tax evasion*, yaitu tindakan ilegal atau melanggar hukum perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Untuk lebih jelasnya penulis akan tuangkan dalam tabel mengenai operasionalisasi variabel penelitian, seperti tertuang pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
<i>Self Assessment System</i> (Variabel X)	<i>Self assessment system</i> adalah sistem perpajakan yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.	1. Wajib Pajak - Mendaftar - Menghitung - Menyetor a. Mengisi SSP b. Tepat waktu c. Tempat membayar	Ordinal

Lanjutan Tabel 3.1

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
		<ul style="list-style-type: none"> - Melapor <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi SPT b. Waktu pelaporan c. Tempat melapor 2. Fiscus <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan - Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan b. Pengenaan sanksi 	
Sanksi Pajak (Variabel X)	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan	3. Sanksi Administrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi berupa denda b. Sanksi berupa bunga c. Sanksi berupa kenaikan jumlah pajak 4. Sanksi Pidana <ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi kurungan b. Sanksi penjara 	Ordinal
<i>Tax Evasion</i> (Variabel Y)	Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.	5. Tidak menyampaikan SPT 6. Menyampaikan SPT dengan tidak benar 7. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP 8. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong 9. Berusaha menyuap fiskus	Ordinal

Operasionalisasi variabel seperti dalam tabel 3.1, semua menggunakan skala ordinal, dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Sedangkan variabel-variabel tersebut diukur atau dinilai dengan menggunakan tipe skala Likert, karena penelitian ini meneliti persepsi wajib pajak mengenai *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion*.

Sesuai dengan tipe skala Likert yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian, maka setiap pilihan jawaban kuesioner diberi skoring. Responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif), seperti pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Scoring untuk jawaban kuesioner

Jawaban Responden	Skor
Sangat Negatif	1
Negatif	2
Ragu-Ragu	3
Baik	4
Sangat Baik	5

Sumber: Sugiyono (2008:133)

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti adalah sebagai berikut;

1. Angket atau kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang dia ketahui.

2. Interview (wawancara)

Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang wajib pajak, pendidikan, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.

3. Observasi

Di dalam artian penelitian observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.

3.8 Analisis Data

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dan Metode Verifikatif. Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Penelitian Verifikatif

Penelitian Verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel *independent* (X) terhadap variabel *dependent* (Y) yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Sedangkan untuk menguji kaitan antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* digunakan analisis kuantitatif.

3.8.1 Analisis Kualitatif

Metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang menjelaskan pengaruh dan hubungan yang dinyatakan dengan kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab. Menurut Umi Narimawati (2007:83) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.

1. Setiap indikator/sub variabel yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan ke dalam lima alternatif jawaban dengan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban. Peringkat jawaban setiap indikator diberi skor antara 1 sampai dengan 5.
2. Dihitung total skor setiap variabel/sub variabel = jumlah skor dari seluruh skor indikator variabel untuk semua responden.
3. Dihitung skor setiap variabel/sub variabel = rata-rata dari total skor.

4. Untuk mendeskripsikan jawaban responden juga digunakan statistik seperti distribusi frekuensi dan ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik dengan bantuan software Excell dan SPSS.”

Penetapan peringkat dalam setiap variabel penelitian, dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dan ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden, sedangkan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pertanyaan kuesioner dikalikan dengan jumlah responden. Apabila digambarkan dengan rumus, maka akan tampak seperti di bawah ini.

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2007:83)

Keterangan:

- Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
- Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Tabel 3.3 Kriteria skor jawaban responden berdasarkan persentase skor aktual

Persentase Skor	Kategori Skor
20,00 - 36,00	Sangat Rendah/ Tidak Baik
36,01 - 52,00	Rendah/ Kurang Baik
52,01 - 68,00	Cukup Tinggi/ Cukup Baik
68,01 - 84,00	Tinggi/ Baik
84,01 – 100	Sangat Tinggi/ Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati (2007:85)

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan

kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh *item-item* pertanyaan/pernyataan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.

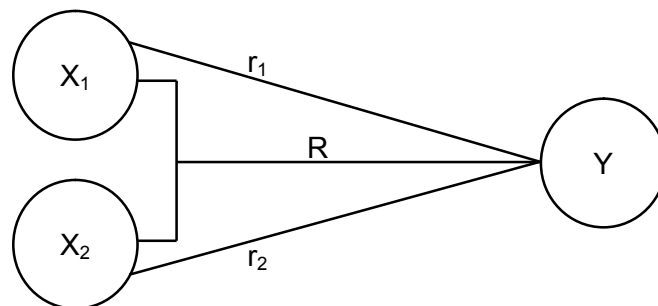
3.8.2 Analisis Kuantitatif

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi dan memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion*, maka analisis kuantitatif yang akan digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis korelasi ganda.

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dua variabel *independent* (X) atau lebih terhadap variabel *dependent* (Y) secara bersama-sama. Pemahaman ini kita bisa lihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 Regresi berganda



Keterangan :

X_1 : Self assessment system

X_2 : Sanksi pajak

Y : Tax evasion

R : Regresi berganda

Pada penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu self assessment dan sanksi pajak, maka persamaan-persamaan yang ada pada regresi berganda dapat dimanfaatkan untuk menghitung

regresiberganda lebih dari dua variabel secara bersama-sama. Rumus regresi berganda dua variabel ditunjukkan pada rumus, seperti berikut.

$$R_{y.x1x2} = \frac{r_{yx1}^2 + r_{yx2}^2 - 2 r_{yx1} r_{yx2} r_{x1x2}}{1 - r_{x1x2}^2}$$

Keterangan;

- $R_{y.x1x2}$ = regresiberganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y
 r_{yx1} = koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y
 r_{yx2} = koefisien korelasi antara variabel X2 dengan Y
 r_{x1x2} = korelasi Product Moment antara X1 dengan X2

Nilai koefisien korelasi untuk menilai kekuatan hubungannya berada di antara -1 sampai 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-). Dari perhitungan tersebut, nilai yang didapat merupakan nilai koefisien korelasi simultan atau bersama, dalam penelitian ini variabel pelaksanaan *self assessment* dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Selanjutnya, untuk mencari berapa koefisien korelasi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat ketika variabel bebas, digunakan persamaan korelasi parsial.

b. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara pelaksanaan sistem *self assessment* dengan tindakan *tax evasion*, dan hubungan antara pelaksanaan sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion* secara parsial, tidak simultan atau bersama-sama. Untuk mendapatkan nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, kita bisa menggunakan persamaan seperti tertulis pada lembaran berikutnya.

$$r_{x1.y} = \frac{n(\sum x_1 y) - (\sum x_1)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x_1^2) - (\sum x_1)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Persamaan tersebut diatas untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara pelaksanaan *self assessment system* dengan tindakan *tax evasion*, selanjutnya penjabaran dari rumus tersebut diatas, yaitu;

$$r_{x1.y} = \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r_{x1y} : Koefisien korelasi antara *self assessment system* dengan tindakan *tax evasion*.
- $\sum X_1$: Jumlah data persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assesment*
- $\sum Y$: Jumlah dari tindakan *tax evasion*.
- $\sum X_1 Y$: Jumlah data *self assessment* dan *tax evasion*.
- $\sum X_1^2$: Jumlah data (*self assessment*)²

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara pelaksanaan sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion*, maka rumus yang digunakan adalah;

$$r_{x2.y} = \frac{n(\sum X_2 Y) - (\sum X_2)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- $r_{x1.Y}$: Koefisien korelasi antara sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion*.
- $\sum X_2$: Jumlah data persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi pajak
- $\sum Y$: Jumlah dari tindakan *tax evasion*.
- $\sum X_2 Y$: Jumlah data sanksi pajak dan *tax evasion*.
- $\sum X_2^2$: Jumlah data (sanksi pajak)²

Koefisien korelasi menunjukan berapa besar varians total satu variabel berhubungan dengan varians variabel lain. Hal ini berarti

bahwa tiap nilai r perlu ditafsirkan posisinya dalam keterkaitan tersebut. Untuk memberikan tafsiran pada nilai koefisien korelasi, dapat digunakan referensi *guilford empirical rules* pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Penafsiran koefisien korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2003 : 183

c. Koefisien Determinasi Parsial

Setelah nilai koefisien korelasi telah didapatkan, maka nilai koefisien determinasi pada penelitian ini dapat diperoleh. Korelasi r_{yx1x2} hanya menyatakan keeratan hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis koefisien determinasi dimana langkah perhitungannya sebagai berikut.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Persamaan tersebut diatas adalah untuk mengetahui keeratan hubungan antara pelaksanaan *self assessment system* dengan tindakan *tax evasion*, maka rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$Kd_{x1y} = r_{x1y}^2 \times 100\%$$

Selanjutnya, untuk mengetahui keeratan hubungan antara pelaksanaan sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion*, maka rumus yang digunakan adalah;

$$Kd_{x2y} = r_{x1y}^2 \times 100\%$$

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.9.1. Uji Validitas

Sugiyono(2008:3), mengatakan bahwa "Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti."

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test

(kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur disebut valid bila diamlakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.

Seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total = 0,25 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan apabila < 0,25 berarti data tersebut dapat dikatakan tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan rumus korelasi *pearson* (r).

Seperti dilakukan pengujian lebih lanjut, semua item pernyataan dalam kuesioner harus

sdijujikeabsahannyauntukmenentukanvalidtidaknyaasuatuitem.

Ujivaliditasdilakukan untukmengukurpernyataanyangadadalamkuesioner.

Validitassuatudatatercapaijikapernyataantersebutmampumengungkapkan apa

yangakandiungkapkan.Ujivaliditasdilakukandenganmengkorelasikanmasing-masingpernyataandenganjumlahskoruntukmasing-

masingvariabel.Teknikkorelasiyangdigunakanadalahteknikkorelasipearson product moment.

Untukmempercepatdanmempermudahpenelitianinipengujianvaliditas dilakukan denganbantuankomputerdenganmenggunakansoftwareSPSS 22.0forwindowsdengan

metodekorelasipearsonproductmomentyangrumusnya sebagai berikut.

$$r_{x2,y} = \frac{n (\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Sumber:Sugiyono (2008:248)

Keterangan:

r = Koefisienkorelasipearsonproduct moment

X= Persepsi wajib pajakorangpribadiataspelaksanaan Self AssessmentSystem

Y= TindakanTaxEvasion

n = Ukuransampelataubanyakdatadidalam sampel

3.9.2.UjiReliabilitas

Sugiyono (2008:3) mengungkapkan bahwa “reliabilitas adalah derajat konsistensi/keajegan datadalam interval waktutertentu.”

Berdasarkan definisi diatas, makareliabilitasdapatdiartikansebagaisuatu

karakteristikterkaitdengankeakuratan,ketelitian,dankekonsistenan.Suatu alatdisebutreliabelapabila

dalambeberapakalipelaksanaanpengukuranterhadapkelompok subjeksamasekali diperoleh hasilyangrelatifsama,selamaaspekyangdiukurdalamdirisubjekmemangbel umberubah. Dalamhalinirelatifsamaberartitetap adanyatoleransiperbedaan-perbedaankecildiantara hasilbeberapa kalipengukuran.Pengujianinibertujuanuntukmenunjukkansejauhmanasuatuhasil pengukuranrelatifkonsisten.

Pengujianreliabilitaskuesionerpenelitianmenggunakanteknikspearmanbrown Metode ini menghitung reliabilitas dengan cara memberikan tespada sejumlahsubyekkemudianhasiltestersebutdibagimenjadiduabagianyang samabesar.

RumusSpearmanBrown:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

r_i =reliabilitasinternal seluruhinstrumen

r_b =korelasiprodukt momentantarabelahanpertamadankedua

3.10. Uji Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif, karena menanyakan hubungan variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat), maka untuk menguji hipotesis peneltian ini, digunakan uji F dan uji t.

3.10.1 Uji Statistik Secara Simultan(F)

Uji statistik (F) dalam penelitian ini, digunakan untuk menunjukkan apakah *self assessment system* dan sanksi pajak yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

tindakan *tax evasion*. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F, dengan rumus seperti di bawah ini.

$$F = \frac{R^2 k /}{(1-R^2) / (n-k-1)}$$

Keterangan :

R = koefisien korelasi ganda
k = jumlah variabel Independen
n = jumlah sampel

Nilai F ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai F tabel, dimana nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan F tabel dengan dk pembilang =2, dk penyebut =12, dengan taraf kesalahan 5%. Cara lain untuk mencari nilai F tabel dengan menggunakan program Ms Excel dengan mengetik FINV(0.05,2,12) maka diperoleh nilai F tabel = 3,88.

Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan kriteria;

1. Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel pada alpha 5% untuk koefisien positif.
2. Terima Ho jika Fhitung < Ftabel pada alpha 5% untuk koefisien negatif.

Dari kriteria diatas, maka Jika F hitung lebih besar daripada F table, dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak, yaitu X1 dan X2 memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Y. Begitu juga sebaliknya apabila nilai F hitung lebih kecil, maka *self assessment system* dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

3.10.2 Uji Statistik Secara Parsial (t)

Uji statistik parsial (t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (*self assessment system*) dalam menerangkan variabel dependen (*tax evasion*, dan menunjukkan seberapa jauh pengaruh (sanksi pajak) dalam

menerangkan tindakan *tax evasion*. Selanjutnya, kita bisa gunakan persamaan dibawah ini;

$$t_{x1} = r_{x1y} \sqrt{\frac{n - k - 1}{(1 - r_{x1y}^2)}}$$

Selanjutnya, sehubungan dengan penelitian ini, maka;

$$t_{x2} = r_{x2y} \sqrt{\frac{n - k - 1}{(1 - r_{x2y}^2)}}$$

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria;

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab-bab sebelumnya telah dijabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, teori-teori yang menjadi acuan penelitian, maupun metode yang digunakan oleh peneliti, maka pada bab ini akan dipaparkan lebih mendalam mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner dari responden penelitian.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan yang secara hierarki berada dibawah kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK/2008 KPP Pratama Palopo sebagai bagian modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan sistem administrasi perpajakan di Kota Palopo yaitu KPP Palopo yang mengurus PPh, PPN dan pajak tidak langsung lainnya serta KPP PBB palopo yang mengurus PBB.

Kedua kantor tersebut sebelumnya memiliki wilayah kerja yang berbeda, untuk KPP Palopo memiliki wilayah kerja sebanyak 9 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja (sebelum terjadi pemekaran) dan Kab. Enrekang, Kab. Bone dan Kab. Wajo. Setelah melebur menjadi KPP Pratama Palopo, wilayah kerjanya menjadi 6 Kabupaten/Kota yang meliputi Kota Palopo, kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur,

Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara yang terdiri dari 83 Kecamatan, dan 827 desa/kelurahan dengan luas wilayah 1.645.615 Ha yang dihuni sekitar 1.538.651 jiwa.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo memiliki ciri has yang terletak pada modelnya yang menyerupai rumah bangsawan di daerah Luwu dan Toraja (bagian atap perpaduan arsitektur adat Bugis dan Toraja), memiliki dua halaman depan di sebelah timur menghadap kelaut dan sebelah barat menghadap kepegunungan. Letak KPP Pratama Palopo berhadapan dengan kantor walikota dan diapit dua jalan utama Kota Palopo di sebelah timur menghadap ke Jl. Andi Kambo sedangkan di sebelah barat menghadap ke Jl. Andi Jemma.

Sejak awal terbentuknya, KPP Pratama Palopo sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami dua kali pergantian kepemimpinan, yakni di periode awal mulai pertengahan tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2009 dipimpin oleh bapak I Ketut Sukarda yang saat ini juga menjabat sebagai kepala KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, selanjutnya dipimpin oleh bapak Dionysius Lucas Hendrawan, selanjutnya Bapak Muhammad Armadari hingga saat ini.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo, terdiri dari beberapa seksi-seksi, adapun pembagiannya terdiri atas;

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sub Bagian Umum
4. Seksi Pelayanan

5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
7. Seksi Penagihan
8. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, dan IV).

Uraian diatas lebih jelasnyadapat dilihat pada lampiran 1 tentang struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan wajib pajak dan pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palopo.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuaidengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

3. Sub Bagian Umum

Fungsi dari sub bagian umum yaitu melaksanakan tugas kesekretariatan, mengatur kegiatan-kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga organisasi serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi KPP Pratama Palopo.

4. Seksi Pelayanan

Tugas utama dari seksi pelayanan yaitu melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan, permohonan dan surat lainnya, penyuluhan dan sosialisasi perpajakan, penerbitan NPWP/NPPKP, serta memberikan jawaban konfirmasi.

5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas utama dari seksi ini yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta menyiapkan laporan kerja.

6. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertanggung jawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan berNPWP, pencairan data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

7. Seksi Penagihan

Seksi penagihan merupakan ujung tombak penegakan hukum (*law enforcement*) yang bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak yang memberikan keputusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan piutang pajak.

8. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Tugas dari seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan,

pengawasan pelaksanaan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, dan IV)

Seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) bertugas memberikan konsultasi, bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan melalui Account Representative (AR) yang ada di waskon masing-masing.

4.1.3 Aspek-Aspek Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo berfungsi untuk memberikan pelayanan publik, khususnya memberikan pelayanan yang baik dan mudah kepada wajib pajak, untuk membantu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo.

A. Visi dan Misi

1. Visi KPP Pratama Palopo

Menjadi kantor yang memberikan pelayanan terbaik, transparan, profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

2. Misi KPP Pratama Palopo

Mengoptimalkan penggalan potensi penerimaan pajak melalui sistem administrasi perpajakan modern secara adil, transparan dan akuntabel

B. Motto dan Janji Layanan

1. Professional

Bekerja sesuai dengan aturan dan etika profesi serta menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi

2. *Educate*

Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang perpajakan

3. *Responsive*

Selalu respon terhadap kritik, saran dan keluhan masyarakat

4. *Friendly*

Melayani dengan hati seperti seorang sahabat

5. *Care*

Peduli terhadap wajib pajak, masyarakat dan lingkungan sekitar

6. *Trustfull*

Menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Mengutip semboyan lama dari suku bugis, maka janji layanan KPP Pratama Palopo dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu;

1. *Sipakatau*

Kata ini mengandung arti saling menghormati, dalam hal melayani KPP Pratama Palopo mengedepankan sikap menghormati antara fiskus

2. *Sipakainge*

Kata ini mengandung arti saling mengingatkan, KPP Pratama Palopo membuka diri untuk selalu menerima kritik dan saran dari wajib Pajak

3. Sipakalebbi

Kata ini mengandung arti saling menghargai, dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Palopo menerapkan sikap menghargai terhadap wajib pajak tanpa mebeda-bedakan.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut hasil penelitian yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 60 responden sebagai sumber data dalam penelitian ini. Pertanyaan dalam kuesioner terdiri dari 35 butir, dengan perincian 17 pertanyaan mengenai pelaksanaan *self assessment system*, 7 pertanyaan tentang sanksi pajak, dan 11 pertanyaan tentang tindakan *tax evasion*. Selanjutnya yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada wilayah Waskon III dalam hal ini yaitu Kota Palopo, khususnya di kelurahan Palopo.

Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Sedangkan untuk menguji kaitan antara pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap tindakan *tax evasion* digunakan analisis kuantitatif.

4.2.1 Karakteristik Responden

Data dalam penelitian ini, peneliti peroleh dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada wilayah Waskon III dalam hal ini yaitu Kota Palopo, dan petugas pajak (*fiscus*) dengan jumlah responden masing-masing 60 orang untuk wajib pajak orang pribadi dan 60 orang untuk *fiscus*. Hal ini disebabkan kuisisioner yang diberikan memilih dua sasaran yakni wajib pajak orang pribadi dan

petugas pajak (*Fiscus*), agar diperoleh jawaban yang berimbang dan relevan dengan keadaan yang sebenarnya.

Kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi adalah untuk menilaipelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak, sedangkan kuesioner mengenai tindakan *taxevasion* diberikan kepada petugas pajak (*Fiscus*). Karakteristik responden dapat terjadi ketimpangan antara strata yang satu denganlainnya karena sebaran data yang memberikan peluang sama kepada semuaanggota populasi untuk menjadi sampel. Lebih jelasnya karakteristik responden dalam penelitianini dijabarkan pada lembaran berikutnya.

A. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik wajib pajak orang pribadidan *fiscus*berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Profil responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Wajib Pajak		Fiscus	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	46	76,66 %	48	80 %
Perempuan	14	23,33 %	12	20 %
Total	60	100 %	60	100 %

Sumber : Hasil olahan data primer 2014

Berdasarkan apa yang tertera pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo yang terpilih sebagairesponden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Dari data hasil kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi berjeniskelamin laki-laki sebesar 76,66%, sedangkan yang berjenis kelaminperempuan sebesar 23,33%. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwamayoritas responden

adalah laki-laki karena sebagian besar perempuan yang sudah menikah, penghasilannya tercatat atau digabung dengan suami dalam satu nomor pokok wajib pajak.

Selanjutnya, *fiscus* atau petugas pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palopo yang dipilih sebagai responden menunjukkan bahwa yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 80%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas KPP Pratama Palopo dengan cakupan wilayah yang sangat luas, masyarakat yang heterogen dengan kultur yang beragam, maka selain basic keilmuan pajak yang dimiliki petugas pajak, juga diperlukan mental dan fisik yang kuat dalam mengoptimalkan penggalan potensi penerimaan pajak.

B. Profil Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia wajib pajak orang pribadi dan *fiscus*, dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Profil responden berdasarkan usia

Usia	Wajib Pajak		Fiscus	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
≤ 25 Tahun	0	0%	7	11,66 %
26-35 Tahun	24	40%	28	46,66 %
36-45 Tahun	23	38,33%	9	15 %
≥ 46 Tahun	13	21,66%	16	26,66 %
Total	60	100 %	60	100 %

Sumber : Hasil olahan data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa responden wajib pajak orang pribadi yang berusia dibawah atau 25 tahun adalah 0%, sedangkan usia 26-35 tahun sebanyak 40%. Usia 36-45 tahun sebanyak 38,33%, dan usia diatas atau 46 tahun sebanyak 21,66%. Tampilan data tersebut

menyimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 26-45 tahun, hal ini disebabkan mayoritas penghasilan masyarakat yang kena pajak berada pada usia produktif.

Selanjutnya, tabel 4.2 menunjukkan bahwa *fiscus* yang dijadikan responden, dan berusia dibawah atau 25 tahun adalah 11,66%, sedangkan usia 26-35 tahun sebanyak 46,66%.Usia 36-45 tahun sebanyak 15%, dan usia diatas atau 46tahun sebanyak 26,66%.Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas petugas pajak yang ada di KPP Pratama Palopo berusia 26-35 tahun, hal ini disebabkan mayoritas jabatan yang ada di kantor tersebut adalah pelaksana dan AR yang membutuhkan tenaga muda untuk menjangkau semua wilayah kerja dari KPP Pratama yang sangat luas. Adapun usia antara 36 tahun keatas berdasar atas pengalaman kerja yang dimiliki dan posisi penting dalam menjalankan fungsi dan tugas KPP Pratama Palopo.

C. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir

Wajib Pajak Orang Pribadi			Petugas Pajak (Fiscus)		
Pend. Terakhir	Jumlah	Persentase	Pend. Terakhir	Jumlah	Persentase
SMP - SMA	35	58,33%	SMA	12	20 %
D1 - D3	9	15%	D1 - D3	27	45 %
Strata 1	16	26,66%	Strata 1	15	25 %
Strata 2	0	0%	Strata 2	6	10 %
Total	60	100 %	Total	60	100 %

Sumber : Hasil olahan data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden wajib pajak orang pribadi dengan pendidikan terakhir SMP dan SMA sebanyak 58,33%, pendidikan terakhir diploma 1 (D1) dan diploma 3 (D3) sebanyak 15%, pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 26,66%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir adalah SMP dan SMA, hal ini kemungkinan karena masyarakat yang berpenghasilan cukup untuk dikenakan pajak sebagian besar dari mereka yang berpendidikan terakhir SMP dan SMA sehingga peluang untuk menjadi wajib pajak tidak terletak pada pendidikan terakhir, tapi terletak pada sasaran pengenaan pajak itu sendiri.

Selanjutnya, tabel 4.3 menunjukkan bahwa *fiscus* yang ada pada Kantor Pajak Pratama Palopo dengan kualifikasi pendidikan terakhir SMA sebanyak 20%, pendidikan terakhir Diploma 1 sampai Diploma 3 (D1 - D3) sebanyak 45%, pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 25%, pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas *fiscus* berpendidikan terakhir adalah Diploma 1 dan Diploma 3, hal ini karena dalam pelaksanaan fungsi dan tugas di KPP Pratama Palopo dibutuhkan kualifikasi pendidikan yang berlatar belakang perpajakan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan kantor.

4.2.2 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan SelfAssessment System Pada KPP Pratama Palopo

Untuk menilai bagaimana pelaksanaan *self assessment system* di KPP Pratama Palopo, maka peneliti memberikan 17 butir pertanyaan kepada wajib pajak orang pribadi. Kuesioner terdiri dari 6 indikator, yaitu mendaftar, menghitung, membayar, melapor, pelayanan fiskus dan pengawasan fiskus.

1) Mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi

Berikut adalah hasil dari tanggapan responden mengenai indikator mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Lebih jelasnya kita dapat melihat pada tabel 4.4, di bawah ini.

Tabel 4.4 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai proses pendaftaran

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang proses memperoleh NPWP?	f	1	8	8	9	34	247
		%	1.7	13.3	13.3	15	56.7	82.33
2	Berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan NPWP?	f	5	3	11	11	30	238
		%	8.3	5	18.3	18.3	50	79.33
3	Kenapa Bapak/Ibu memiliki NPWP?	f	10	13	4	22	11	191
		%	16.7	21.7	6.7	36.7	18.3	63.67
	Total	f	16	24	23	42	75	676
		%	8.89	13.33	12.78	23.33	41.67	75.11

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai proses pendaftaran.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{676}{3 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{676}{900} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75,11\%$$

Proses pendaftaran NPWP menurut tanggapan wajib pajak dirasakan telah mengakomodir sebagian besar masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan hanya 1,7% saja wajib pajak yang merasakan masih terdapat kendala dalam pendaftaran NPWP dan persentase skor tanggapan responden atas proses memperoleh NPWP sebesar 82,33% menunjukkan bahwa proses pendaftaran dinilai baik.

Waktu yang diperlukan wajib pajak untuk memperoleh NPWP berdasarkan *Standard Operating Procedure* adalah satu jam, 50%

responden menyatakan bahwa mereka telah memperoleh pelayanan sesuai dengan standar tersebut. Jumlah tersebut sebenarnya dapat meningkat karena saat peneliti berada di lapangan ditemukan terdapat beberapa masyarakat yang pendaftarannya dititipkan melalui pihak lain sehingga waktunya pun menjadi bertambah lama. Kemudian persentase skor tanggapan responden atas waktu yang diperlukan untuk memperoleh NPWP sebesar 79,33% menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh NPWP telah diberikan KPP Pratama Palopo sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan kata lain dalam kategori baik.

Alasan wajib pajak memiliki NPWP sudah baik karena 36,7% responden menyatakan bahwa mereka mentaati ketentuan yang berlaku dan hanya 6,7% yang menyatakan hanya ikut-ikutan saja. Hal ini ditunjukkan pula oleh persentase skor tanggapan responden atas alasan memiliki NPWP sebesar 63,67% yang berada pada kategori cukup.

Dari ketiga pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai proses pendaftaran sebagai wajib pajak sebesar 75,11% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *selfassessment system*, proses pendaftaran NPWP cukup memudahkan masyarakat. Namun di sisi lain masih terdapat kekurangan akibat rendahnya kesadaran masyarakat seperti yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menjadi wajib pajak.

2) Menghitung pajak

Hasil tanggapan responden mengenai indikator menghitung pajak, dapat kita lihat pada tabel 4.5 di lembaran selanjutnya.

Tabel 4.5 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai menghitung pajak

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang proses perhitungan pajak?	f	6	19	22	12	1	163
		%	10	31.7	36.7	20	1.7	54.33
5	Kapan Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru, misalnya mengenai perubahan tarif / PTKP / batas PKP?	f	9	17	6	25	3	176
		%	15	28.3	10	41.7	5	58.67
6	Setelah mengetahui peraturan perpajakan terbaru, apakah Bapak/Ibu sudah dapat melaksanakannya?	f	0	6	26	12	16	218
		%	0	10	43.3	20	26.7	72.67
7	Dari mana Bapak/Ibu dapat mengetahui peraturan terbaru?	f	1	39	7	4	9	161
		%	1.7	65	11.7	6.7	15	53.67
	Total	f	16	81	61	53	29	718
		%	6.67	33.75	25.42	22.08	12.08	59.83

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai menghitung pajak.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{718}{4 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{718}{1200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59,83\%$$

Dimulai dari perhitungan pajak terutang yang benar maka penerimaan pajak akan sesuai dengan yang seharusnya. Namun, perhitungan pajak yang merupakan salah satu bagian penting dalam penerimaan pajak justru menjadi sesuatu yang menghambat. Sebanyak 36,7% responden menyatakan bahwa wajib pajak menyatakan biasa saja dalam perhitungan pajaknya dan didukung pula oleh rata-rata skor

tanggapan responden sebesar 54,33% yang menunjukkan kategori cukup. Hal ini dapat membuat proses pemungutan pajak menjadi tidak efektif dan efisien karena diperlukan waktu dan dana tambahan untuk menyelesaikan kekeliruan yang terjadi.

Saat mengalami perubahan ketentuan/peraturan dalam perhitungan pajak, rata-rata skor tanggapan responden sebesar 58,67%, hal ini menunjukkan bahwa responden kurang cepat dalam menanggapi aturan baru yang berarti cukup. 41,7% responden mengetahui perubahan peraturan pada saat akan mengurus pajak sehingga dapat dipastikan terjadi kesalahan dalam penentuan pajak terutang yang berdampak pada penerimaan pajak yang tidak sesuai.

Setelah mengetahui perubahan peraturan, 43,3% responden belum mau melaksanakannya karena masih menunggu wajib pajak lain untuk menerapkan peraturan tersebut sehingga terjadi gejala saling menunggu. Mereka tidak ingin mengalami kerugian seandainya orang lain juga masih menjalankan peraturan lama yang biasanya selalu lebih rendah dalam perhitungan pajaknya. Rata-rata skor tanggapan responden atas pelaksanaan peraturan baru sebesar 72,67% menyatakan pelaksanaan peraturan baru dalam kategori baik.

Sebanyak 65% responden mengetahui perubahan peraturan dari petugas saat pengurusan pajak, angka tersebut menunjukkan masih sedikitnya partisipasi langsung masyarakat untuk memperbaharui ketentuan perhitungan pajak meskipun persentase skor tanggapan responden atas informasi peraturan terbaru sebesar 53,67% termasuk kategori cukup.

Persentase skor tanggapan responden mengenai menghitung pajak berada pada kategori cukup dengan nilai sebesar 59,83%. Angka tersebut mencerminkan terdapat kendala yang dialami masyarakat untuk menghitung pajaknya dalam pelaksanaan *Self Assessment System* seperti yang dialami masyarakat selama ini.

3) Membayar pajak

Hasil tanggapan responden mengenai indikator membayar pajak, dapat kita lihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai membayar pajak

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Kapan Bapak/Ibu biasa menyetorkan pajak?	f	1	17	22	4	16	197
		%	1.7	28.3	36.7	6.7	26.7	65.67
9	Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan tempat penyetoran pajak?	f	2	5	4	21	28	248
		%	3.3	8.3	6.7	35	46.7	82.67
	Total	f	3	22	26	25	44	445
		%	2.50	18.33	21.67	20.83	36.67	74.17

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai membayar pajak.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{445}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{445}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 74,17\%$$

Sebanyak 36,7% responden menyatakan bahwa wajib pajak selalu menyetorkan pajaknya pada saat perhitungan selesai dilakukan. Meskipun belum melewati batas yang ditentukan, namun hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang belum begitu baik karena dengan kejadian tersebut dapat juga menyebabkan *human error* dalam pelayanan wajib pajak akibat terjadinya penumpukan massa. Persentase

skor tanggapan responden atas waktu penyetoran pajak sebesar 65,67% menunjukkan waktu yang digunakan pembayaran dalam kategori cukup.

Sebagian besar responden memberi tanggapan atas tempat penyetoran pajak sebesar 82,76% berada pada kategori baik sehingga tempat penyetoran pajak yang selama ini telah ada dirasakan wajib pajak telah memudahkan dan membantu wajib pajak (46,7%). Selanjutnya, pembayaran pajak terutang, persentase skor tanggapan responden menunjukkan angka 74,17% yang berada pada kategori baik. Kepatuhan wajib pajak sudah baik karena mayoritas wajib pajak menyetor pajak saat perhitungan selesai dilakukan. Dilihat dari tempat pembayaran juga telah memudahkan dan membantu wajib pajak.

4) Melaporkan pajak

Berikut hasil tanggapan responden wajib pajak orang pribadi pada tabel 4.7 mengenai indikator melaporkan pajak.

Tabel 4.7 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai melaporkan pajak

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
10	Siapa yang melakukan proses perhitungan & pelaporan pajak Bapak/Ibu?	f	18	2	1	2	37	218
		%	30	3.3	1.7	3.3	61.7	72.67
11	Kapan Bapak/Ibu biasa melaporkan SPT?	f	11	13	8	18	10	183
		%	18.3	21.7	13.3	30	16.7	61
12	Dari mana Bapak/Ibu dapat mengetahui batas waktu penyampaian SPT?	f	4	4	2	31	19	237
		%	6.7	6.7	3.3	51.7	31.7	79
13	Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan tempat pelaporan pajak (KPP)?	f	0	5	12	7	36	254
		%	0	8.3	20	11.7	60	84.67
	Total	f	33	24	23	58	102	892
		%	13.75	10.00	9.58	24.17	42.50	74.33

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai melaporkan pajak dapat kita lihat pada lembaran berikutnya.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{892}{4 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{892}{1200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 74,33\%$$

Sebanyak 61,7% responden menyatakan bahwa dalam melaporkan SPT dan yang melakukan perhitungan pajaknya adalah mereka sendiri, sedangkan yang melalui calo hanya 1,7%. Sedangkan persentase skor tanggapan responden atas siapa yang melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sebesar 72,67% menyatakan tanggapan yang baik.

Waktu yang paling sering digunakan untuk pelaporan SPT oleh wajib pajak adalah pertengahan batas waktu pelaporan (30%), sesuai dengan persentase skor tanggapan responden yang cukup (61%). Hal ini memang menegaskan sudah membaiknya kepatuhan dari masyarakat dalam kewajiban bernegara.

Mayoritas wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT berasal dari sosialisasi petugas (51,7%), hal ini cukup efektif untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Persentase skor tanggapan responden yang berada pada kategori baik (79%) menunjukkan masih perlunya perbaikan agar wajib pajak tahu kapan waktu untuk melaporkan SPT.

Tempat pelaporan SPT dirasakan masyarakat sebagai memudahkan dan membantu wajib pajak (60%) dan hanya 8,3% yang menyatakan kurang memadai. Rata-rata tanggapan responden

menyatakan baik (84,67%). Sedangkan proses pelaporan pajak terutang dalam pelaksanaan *Self Assessment System* berada pada kategori baik dengan persentase berada pada angka (74,33%).

5) Pelayanan fiskus

Tabel 4.8 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai indikator pelayanan fiskus.

Tabel 4.8 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelayanan fiskus

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
14	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan petugas dalam mengurus pajak?	f	2	7	7	25	19	232
		%	3.3	11.7	11.7	41.7	31.7	77.33
15	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu atau kerabat Bapak/Ibu mengenai pelayanan petugas pajak?	f	2	5	1	32	20	243
		%	3.3	8.3	1.7	53.3	33.3	81
	Total	f	4	12	8	57	39	475
		%	3.33	10.00	6.67	47.50	32.50	79.17

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai pelayanan fiskus.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{475}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{475}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 79,17\%$$

Pelayanan petugas dalam melayani wajib pajak dirasakan masyarakat sedikit membantu (41,7%) dan hanya 3,3% yang menyatakan sedikit membingungkan. Hal ini sesuai dengan persentase skor tanggapan responden atas pelayanan petugas dalam pengurusan pajak yang berada pada kategori baik (77,33%). Sebanyak 53,3% responden menyatakan bahwa selama ini tidak ada kendala yang berarti dalam

pelayanan petugas pajak. Tanggapan responden berada dalam kategori baik (81%).

Tanggapan responden mengenai pelayan fiskus berada pada kategori baik (79,17%) yang berarti bahwa sudah terdapat peningkatan dalam melayani masyarakat dibanding sebelum adanya reformasi perpajakan, meskipun memang masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi seperti adanya sebagian petugas yang mencoba membohongi wajib pajak dan belum cukup terbantunya wajib pajak dalam pelayanan perpajakan.

6) Pengawasan Fiskus

Hasil tanggapan responden mengenai indikator pengawasan fiskus, dapat kita lihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai pengawasan fiskus

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
16	Pemeriksaan perhitungan pajak oleh petugas pajak dilaksanakan sesuai ketentuan....	F	2	9	6	22	21	231
		%	3.3	15	10	36.7	35	77
17	Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan sanksi yang diterapkan selama ini?	F	10	6	13	25	6	191
		%	16.7	10	21.7	41.7	10	63.67
	Total	F	12	15	19	47	27	422
		%	10.00	12.50	15.83	39.17	22.50	70.33

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai pengawasan fiskus.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{422}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{422}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 70,33\%$$

Persentase skor tanggapan responden sebesar 77% berada pada kategori baik. Wajib pajak merasakan keyakinan terhadap kinerja petugas yang melakukan pemeriksaan perhitungan pajak (36,7%) dan hanya 3,3% yang merasa sangat tidak dengan proses pemeriksaan tersebut. Hal ini mengindikasikan masih banyak masyarakat yang belum mengerti proses perhitungan pajak dan juga disinyalir ada yang sengaja melakukan kesalahan perhitungan.

Selanjutnya, untuk pengenaan sanksi yang telah dilaksanakan, persentase skor tanggapan responden sebesar 63,67% berada pada kategori cukup. Artinya pemberian sanksi sudah diupayakan sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan fiskus dalam rangka pelaksanaan *Self Assessment System* menurut responden berada pada kategori baik (70,33%).

7) Ringkasan Data Tanggapan Responden

Variabel persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palopo diukur menggunakan enam indikator. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Ringkasan dari data hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palopo dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden. Ini dapat kita lihat pada tabel 4.10 pada lembaran berikutnya.

Tabel 4.10 Rekapitulasi persentase total skor tanggapan responden mengenai pelaksanaan *self assessment system*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Mendaftar sebagai wajib pajak	676	900	75.11	Baik
2	Menghitung pajak	718	1200	59.83	Cukup
3	Menyetor pajak	445	600	74.17	Baik
4	Melapor pajak	892	1200	74.33	Baik
5	Pelayanan fiskus	475	600	79.17	Baik
6	Pengawasan fiskus	422	600	70.33	Baik
	Total	3628	5100	71.14	Baik

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palopo termasuk dalam kategori baik. Artinya pelaksanaan *Self Assessment System* sudah berjalan baik karena wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran, penyetoran, pelaporan pajak dan pengawasan fiskus. Hanya dalam proses perhitungan pajak yang berada dalam kategori cukup, ini berarti hanya sedikit masalah yang dialami wajib pajak.

4.2.3 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Palopo

Untuk menilai bagaimana pelaksanaan sanksi pajak pada KPP Pratama Palopo, maka peneliti memberikan 7 butir pertanyaan kepada wajib pajak orang pribadi. Kuesioner terdiri dari 2 indikator, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a) Sanksi administrasi

Tabel 4.11 pada lembaran berikutnya, menunjukkan hasil dari tanggapan responden mengenai indikator sanksi administrasi.

Tabel 4.11 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai sanksi administrasi

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Menurut Bapak/Ibu, jika dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran maka wajib pajak akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku?	f	13	5	29	8	5	167
		%	21.7	8.3	48.3	13.3	8.3	55.67
2	Menurut Bapak/Ibu, apakah pembayaran pajak atau penyetoran pajak sudah dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo, dalam hal ini penundaan pembayaran pajak juga akan dikenakan sanksi?	f	12	5	36	7	0	158
		%	20	8.3	60	11.7	0	52.67
3	Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak dan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa pajak, memberatkan anda?	f	14	10	11	24	1	168
		%	23.3	16.7	18.3	40	1.7	56
4	Menurut Bapak/Ibu, pada saat pemeriksaan wajib pajak terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak terutangnya maka akan diterbitkan SKPKB serta ditambah dengan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajak, apakah memberatkan anda?	f	9	12	16	22	1	174
		%	15	20	26.7	36.7	1.7	58
5	Menurut Bapak/Ibu, diterbitkannya SKPKB, maka wajib pajak tidak menambah sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.	f	21	4	16	15	4	157
		%	35	6.7	26.7	25	6.7	52.33
	Total	f	69	36	108	76	11	824
		%	23.00	12.00	36.00	25.33	3.67	54.93

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai sanksi administrasi.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{824}{5 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{824}{1500} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 54,93\%$$

Sebanyak 48,3% responden menyatakan bahwa wajib pajak kadang-kadang tidak memahami petunjuk dalam pengisian SPT dan hanya 8,3% responden yang sangat setuju atau setuju dengan pemberian sanksi apabila dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran.

Sebagian besar responden (60%) menyatakan bahwa wajib pajak kadang-kadang lupa dalam pembayaran/penyetoran pajaknya dan hanya 8,3% responden yang setuju dengan pemberian sanksi dalam hal penundaan pembayaran pajak.

Sebanyak 40% responden menyatakan tidak setuju adanya sanksi administrasi sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa pajak, dan hanya 1,7% responden yang sangat setuju dengan pemberian sanksi administrasi karena ketentuan tersebut telah diatur dalam KUP.

Sebanyak 36,7% responden menyatakan tidak setuju adanya penerbitan SKPKB dan sanksi tambahan sanksi sebesar 100% apabila pada saat pemeriksaan wajib pajak terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak terutanganya, dan hanya 1,7% responden yang sangat tidak setuju dengan hal tersebut karena penerbitan SKPKB tidak ditentukan dalam KUP yang berlaku.

Sebanyak 35% responden menyatakan sangat setuju diterbitkannya SKPKB sehingga tidak menambah sanksi sebesar 100% dari jumlah kurang pajak, dan hanya 6,7% responden yang setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Secara keseluruhan, tanggapan responden mengenai sanksi administrasi termasuk dalam kategori cukup, yakni 54,93%.

b) Sanksi pidana

Berikut adalah hasil dari tanggapan responden mengenai indikator sanksi pidana, dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai sanksi pidana

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan adanya sanksi pidana akan menurunkan tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku?	f	14	4	17	18	7	180
		%	23.3	6.7	28.3	30	11.7	60
7	Menurut Bapak/Ibu, dengan adanya sanksi pidana akan menambah presentase tindakan wajib pajak melakukan penyelundupan pajak?	f	7	8	8	16	21	216
		%	11.7	13.3	13.3	26.7	35	72
	Total	f	21	12	25	34	28	396
		%	17.50	10.00	20.83	28.33	23.33	66

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai sanksi pidana.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{396}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{396}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 66\%$$

Sebanyak 30% responden menyatakan tidak setuju adanya sanksi pidana karena dengan dijatuhkannya sanksi pidana pun masih banyak wajib pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajibannya, dan hanya 6,7%

responden yang setuju karena hukuman/sanksi yang akan diberikan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Sebanyak 35% responden menyatakan tidak setuju karena dengan adanya sanksi pidana ini akan mengurangi penyelundupan pajak, dan hanya 11,7% responden yang sangat setuju karena dengan adanya sanksi pidana ini pun tidak membuat efek jera bagi wajib pajak dalam melakukan penyelundupan pajak.

Secara keseluruhan, tanggapan responden mengenai sanksi administrasi termasuk dalam kategori cukup, yakni 66%.

c) Ringkasan Data Tanggapan Responden

Variabel pelaksanaan sanksi pajak pada KPP Pratama Palopo diukur menggunakan dua indikator. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai pelaksanaan sanksi pajak pada KPP Pratama Palopo dengan menggunakan persentase skortanggapan responden. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4.13 di bawah ini.

Tabel 4.13 Rekapitulasi persentase total skor tanggapan responden mengenai pelaksanaan sanksi pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Sanksi Administrasi	824	1500	54.93	Cukup
2	Sanksi Pidana	396	600	66	Cukup
	Total	1220	2100	58.09	Cukup

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa pelaksanaan sanksi pajak pada KPP Pratama Palopo termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan sanksi pajak masih dapat ditingkatkan agar mengurangi tindakan *tax evasion*.

4.2.4 Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Palopo

Sebanyak 11 butir pernyataan/pertanyaan diajukan kepada petugas pajak untuk menilai bagaimana tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo. Kuesioner terdiri dari 5 indikator, yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, berusaha menyuap fiskus, tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong.

1. Tidak menyampaikan SPT

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator tidak menyampaikan SPT.

Tabel 4.14 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai tidak menyampaikan SPT

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Bagaimana perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT?	f	8	8	9	12	23	214
		%	13.3	13.3	15	20	38.3	71.33
2	Apa yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT?	f	5	9	7	26	13	213
		%	8.3	15	11.7	43.3	21.7	71
	Total	f	13	17	16	38	36	427
		%	10.83	14.17	13.33	31.67	30.00	71.17

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden sesuai pada tabel 4.14 mengenai tidak menyampaikan SPT, seperti di bawah ini.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{427}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{427}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71,17\%$$

Persentase skor tanggapan responden atas perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT sebesar 71,33% berada pada kategori baik. Namun, sebanyak 13,3% wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya dengan sengaja dan bahkan ada yang tetap tidak menyampaikan meski sudah dihimbau petugas (13,3%). Hal ini menunjukkan masih adanya upaya wajib pajak untuk tidak melaporkan pajak. Selanjutnya, wajib pajak tidak menyampaikan SPT walaupun sudah diisi karena mereka terkadang lupa (43,3%). Rata-rata tanggapan responden yang menyatakan bahwa alasan tidak menyampaikan SPT sudah baik (71,33%).

Dari dua pertanyaan di atas, persentase skor tanggapan responden atas indikator tidak menyampaikan SPT berada pada kategori baik (71,17%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memiliki niatan yang baik dalam menyampaikan SPT walaupun mereka terkadang lupa.

2. Menyampaikan SPT Dengan Tidak Benar

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator menyampaikan SPT dengan tidak benar, ini dapat dilihat di tabel 4.15 pada halaman berikutnya.

Tabel 4.15 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai menyampaikan SPT dengan tidak benar

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Apakah SPT yang disampaikan wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kenyataan pembukuannya (melaporkan sebenarnya)?	f	5	20	10	9	16	191
		%	8.3	33.3	16.7	15	26.7	63.67
4	Bagaimana dengan tindakan wajib pajak yang memiliki jabatan/kekuasaan di pemerintahan?	f	4	14	5	20	17	212
		%	6.7	23.3	8.3	33.3	28.3	70.67
	Total	f	9	34	15	29	33	403
		%	7.50	28.33	12.50	24.17	27.50	67.17

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai menyampaikan SPT dengan tidak benar.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{403}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{403}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 67,17\%$$

Meskipun rata-rata tanggapan responden atas kesesuaian isi SPT dengan ketentuan berada pada kategori cukup (63,67%), namun terdapat 33,3% responden yang menyatakan bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPT tapi tidak sesuai dengan mengubah bagian tertentu pada laporan keuangan.

Tindakan wajib pajak yang memiliki jabatan/kekuasaan di pemerintahan adalah memenuhi kewajibannya saat diminta petugas (33,3%) dengan rata-rata tanggapan responden yang baik sebesar

70,67% mencerminkan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan telah berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Persentase skor tanggapan responden atas menyampaikan SPT dengantidak benar yang berada pada kategori cukup yang bernilai 67,17%, artinya masyarakat masih dapat bergerak leluasa untuk menggelapkan pajak dalam pelaksanaan *Self Assessment System* karena pengisian SPT yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, terlebih bagi wajib yang tengah menjabat di pemerintahan.

3. Tidak Mendaftar atau Menyalahgunakan PWP/Pengukuhan PKP

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PPKP.

Tabel 4.16 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Masih banyak masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak tetapi belum menjadi wajib pajak.....	f	11	23	9	10	7	159
		%	18.3	38.3	15	16.7	11.7	53
6	Kenapa masih terdapat masyarakat yang tidak ingin menjadi wajib pajak?	f	2	40	4	5	9	206
		%	3.3	66.7	6.7	8.3	15	68.67
7	Bagaimana wajib pajak dalam penggunaan NPWP / Surat Pengukuhan PKP?	f	2	19	8	13	18	192
		%	3.3	31.7	13.3	21.7	30	64
	Total	f	15	82	21	28	34	524
		%	8.33	45.56	11.67	15.56	18.89	58.22

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PPKP, dapat dilihat pada lembaran berikutnya.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{524}{3 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{524}{900} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58,22\%$$

Sebanyak 53% rata-rata tanggapan responden atas potensi wajib pajak yang belum terdaftar berada pada kategori cukup dan 38,3% responden menyatakan bahwa banyak masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak namun belum mendaftarkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu cara tidak membayar pajak adalah dengan tidak menjadi wajib pajak walaupun sudah seharusnya menjadi wajib pajak.

Alasan masyarakat tidak menjadi wajib pajak sebagian besar (66,7%) karena kekurangsadaran masyarakat. Alasan lainnya yang juga cukup besar adalah sengaja untuk tidak membayar pajak (18,3%). Hal ini digambarkan pula oleh tanggapan responden atas alasan tidak ingin menjadi wajib pajak yang berada dalam kategori cukup sebesar 68,7%. Alasan tersebut cukup berkaitan karena sama-sama bersumber dari rendahnya kesadaran masyarakat.

Dalam menggunakan NPWP/Surat Pengukuhan PKP, persentase tanggapan responden baru dinilai cukup (64%), yang menyatakan masih terdapat penyalahgunaan fungsi dari NPWP / status PKP. Dari tanggapan tersebut kemungkinan besar telah terjadi kebocoran penerimaan pajak akibat hilangnya potensi pajak yang sebenarnya.

Persentase skor tanggapan responden mengenai wajib pajak yang tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan NPWP/Surat Pengukuhan PKP berada pada kategori cukup (58,22%). Artinya masih terdapat upaya penggelapan pajak dengan tidak mendaftarkan maupun

menyalahgunakan NPWP/Surat Pengukuhan PKP seperti pengajuan penghapusan NPWP yang tidak sesuai dari wajib pajak.

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong.

Tabel 4.17 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Bagaimana dengan tindakan wajib pajak selaku pemungut/pemotong dalam melaporkan pajaknya?	f	6	19	7	13	15	192
		%	10	31.7	11.7	21.7	25	64
9	Apa yang membuat pemungut/pemotong tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong?	f	9	25	12	8	6	157
		%	15	41.7	20	13.3	10	52.33
	Total	f	15	44	19	21	21	349
		%	12.50	36.67	15.83	17.50	17.50	58.17

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{349}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{349}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58,17\%$$

Persentase skor tanggapan responden atas tindakan pemungut/pemotong pajak dalam melaporkan pajaknya sebesar 64% berada pada kategori cukup, namun pemungut/pemotong pajak yang melaporkan sebagian pajak yang seharusnya diserahkan kepada negara

sebesar 31,7% menyiratkan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak ketiga pemungut pajak.

Alasan yang menyebabkan pemungut/pemotong pajak tidak melaporkan pajak yang telah diterimanya adalah karena lalai dalam menjalankan tugasnya (41,7%) dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (15%). Alasan tersebut menandakan bahwa wajib pajak tidak sadar terhadap kewajibannya karena telah sengaja melakukan kesalahan, sesuai dengan persentase skor tanggapan responden yang berada dalam kategori cukup (52,33%).

Dari dua pernyataan di atas, kewajiban wajib pajak untuk menyetorkan pajak yang diterimanya berada kategori cukup (58,17%) akibat kesadaran masyarakat yang rendah seperti terjadinya penyelewengan pajak oleh bendaharawan.

5. Berusaha menyuap fiskus

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator berusaha menyuap fiskus.

Tabel 4.18 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai berusaha menyuap fiskus

No	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
10	Terdapat wajib pajak yang berusaha menyuap petugas.....	f	2	18	8	8	24	214
		%	3.3	30	13.3	13.3	40	71.33
11	Tindakan/modus apa yang dilakukan wajib pajak dalam usahanya melakukan penyuapan?	f	17	2	8	23	10	187
		%	28.33	3.33	13.33	38.33	16.67	62.33
	Total	f	19	20	16	31	34	401
		%	15.83	16.67	13.33	25.83	28.33	66.83

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Persentase skor tanggapan responden sesuai tabel 4.18 mengenai berusaha menyuap fiskus.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{401}{2 \times 5 \times 60} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{401}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 66,83\%$$

Sebanyak 40% responden menyatakan sangat sedikit wajib pajak yang mencoba menyuap petugas, namun terdapat 30% responden yang menyatakan banyak wajib pajak mencoba praktik kolusi untuk mengatur pajak terutang yang mesti dibayarnya. Persentase skor tanggapan responden juga menunjukkan kategori baik (71,33%).

Tindakan wajib pajak untuk praktik kolusi yang dilakukan secara langsung menghasilkan angka sebesar 28,33%, suatu tindakan yang sepertinya sudah biasa karena tidak ada rasa canggung meskipun jelas melanggar. Ini mencerminkan kesadaran yang belum tinggi pada tatanan kehidupan masyarakat, sesuai dengan rendahnya rata-rata tanggapan responden 62,33% yang berarti masih cukup.

Berdasarkan persentase skor tanggapan responden yang termasuk kategori cukup (66,83%), hal ini mengindikasikan begitu kuat upaya wajib pajak dalam menggelapkan pajak melalui praktik kolusi dan juga yang disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban bernegara seperti yang dicurigai BPK bahwa ada indikasi konspirasi antara petugas dengan wajib pajak.

6. Ringkasan data tanggapan responden

Variabel tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo diukur menggunakan lima indikator. Jawaban responden dikategorikan dalam

5kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Tabel 4.19 menunjukkan ringkasan dari data hasil penelitian mengenai tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo dengan menggunakan persentase skortanggapan responden.

Tabel 4.19 Rekapitulasi persentase total skor tanggapan responden mengenai tindakan *tax evasion*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Tidak Menyampaikan SPT	427	600	71.17	Baik
2	Menyampaikan SPT dengan tidak benar	403	600	67.17	Cukup
3	Tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan NPWP /pengukuhan PKP	524	900	58.22	Cukup
4	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong	349	600	58.17	Cukup
5	Berusaha menyuap fiskus	401	600	66.83	Cukup
	Total	2104	3300	63.76	Cukup

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Palopo termasuk dalam kategori cukup. Artinya tindakan *tax evasion* masih dapat terjadi dengan berbagai macam upaya yang dilakukan seperti yang ada pada indikator tindakan *tax evasion*.

4.2.5 Analisis Kuantitatif

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis yang diajukan adalah pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion*. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis korelasi.

A) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system*(X1) dan sanksi pajak (X2) dengan tindakan *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Palopo. Dari hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 22 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion*. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20 Hasil analisis regresi linier berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.691	.434		.117
	SAS	-.669	.116	-.574	.000
	Sanksi Pajak	-.252	.094	-.266	.010

a. Dependent Variable: Tax evasion

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 0,691 - 0,669X_1 - 0,252X_2$$

Dimana :

Y = Tindakan *tax evasion*

X₁ = Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system*

X₂ = Sanksi pajak

Nilai konstanta (a) sebesar 0,691 menunjukkan nilai tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo apabila tidak ada persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak. Kemudian nilai koefisien regresi (b₁) sebesar -0,669 menunjukkan penurunan tindakan *tax evasion* apabila persepsi wajib pajak orang

pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* ditingkatkan sebesar satu satuan, sedangkan nilai koefisien regresi (b_2) sebesar -0,252 menunjukkan penurunan tindakan *tax evasion* apabila sanksi pajak ditingkatkan sebesar satu satuan.

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda negatif, artinya semakin baik pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak akan membuat tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo semakin rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak akan membuat tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo semakin tinggi.

B) Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan dicari hubungannya yaitu antara pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 22 for windows*, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y dapat dilihat di tabel 4.21 pada lembaran berikutnya.

Tabel 4.21 Korelasi antara variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y

Correlations		SAS	Sanksi Pajak	Tax evasion
SAS	Pearson Correlation	1	-.157	-.616**
	Sig. (2-tailed)		.231	.000
	N	60	60	60
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	-.157	1	-.356**
	Sig. (2-tailed)	.231		.005
	N	60	60	60
Tax evasion	Pearson Correlation	-.616**	-.356**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	
	N	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 4.21, dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara pelaksanaan *self assessment system* dengan tindakan *tax evasion* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar -0,616. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara pelaksanaan *self assessment system* dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo, sedangkan koefisien hubungan antara pelaksanaan sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar -0,356. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang cukup antara sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo.

Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan sanksi pajak akan membuat tindakan *tax evasion* rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan sanksi pajak akan membuat tindakan *tax evasion* semakin tinggi.

C) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel-variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan

koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan *software SPSS 22 for windows* sebagai berikut.

Tabel 4.22 Koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.448	.429	.37567

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, SAS

Berdasarkan tabel 4.22, dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,448 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD).

$$KD = 0,448 \times 100\% = 44,8\%$$

Koefisien determinasi bernilai 0,448, artinya bahwa tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopodipengaruhi sebesar 44,8% oleh pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya sebesar 55,2% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi dan pelayanan fiskus yang mengecewakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

4.2.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 22.0 for windows* diperoleh hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner kedua variabel seperti dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.23 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner pelaksanaan *self assessment system*

Butir Pertanyaan	Indeks validi	Nilai Kritis	Keterangan
Item_1	0,509	0,25	Valid
Item_2	0,634	0,25	Valid
Item_3	0,623	0,25	Valid
Item_4	0,849	0,25	Valid

Item_5	0,542	0,25	Valid
--------	-------	------	-------

Lanjutan Tabel 4.23

ButirPertanyaan	Indeksvalidi	NilaiKritis	Keterangan
Item_6	0,548	0,25	Valid
Item_7	0,543	0,25	Valid
Item_8	0,696	0,25	Valid
Item_9	0,615	0,25	Valid
Item_10	0,793	0,25	Valid
Item_11	0,736	0,25	Valid
Item_12	0,628	0,25	Valid
Item_13	0,468	0,25	Valid
Item_14	0,514	0,25	Valid
Item_15	0,483	0,25	Valid
Item_16	0,583	0,25	Valid
Item_17	0,520	0,25	Valid
KoefisienReliabilitas=0,824			

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Tabel 4.24 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner tindakan sanksi pajak

ButirPertanyaan	Indeks	NilaiKritis	Keterangan
Item_1	0,718	0,25	Valid
Item_2	0,641	0,25	Valid
Item_3	0,464	0,25	Valid
Item_4	0,633	0,25	Valid
Item_5	0,700	0,25	Valid
Item_6	0,542	0,25	Valid
Item_7	0,680	0,25	Valid
KoefisienReliabilitas=0,751			

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Tabel 4.25 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner tindakan tax evasion

ButirPertanyaan	Indeksvalidita	NilaiKritis	Keterangan
Item_1	0,768	0,25	Valid
Item_2	0,547	0,25	Valid
Item_3	0,749	0,25	Valid
Item_4	0,536	0,25	Valid
Item_5	0,707	0,25	Valid
Item_6	0,612	0,25	Valid
Item_7	0,590	0,25	Valid
Item_8	0,561	0,25	Valid

Item_9	0,463	0,25	Valid
--------	-------	------	-------

Lanjutan Tabel 4.25

ButirPertanyaan	Indeksvalidita	NilaiKritis	Keterangan
Item_10	0,623	0,25	Valid
Item_11	0,517	0,25	Valid
KoefisienReliabilitas=0,812			

Sumber : Hasil olah data software SPSS 22 for windows

Padakeduatabeldiatasdapatdilihatnilaiindeksvaliditassetiapbutirpernyataan lebih besar dari nilai 0,25, artinya semua butir pertanyaan yang diajukanvaliddanlayakdigunakansebagaialatukuruntukpenelitian.Koefisien reliabilitaskeduavariabellebihbesar dari0,70menunjukkanbahwakuesioneryangdigunakanreliabeldalam mengungkapvariabelyangsedangditeliti.

4.2.7 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji keterkaitan antara pelaksanaan *Self Assessment System* dan sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo. Dilakukan pengujian apakah pelaksanaan *Self Assessment System* dan sanksi pajak benar-benar berkaitan dalam tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

(1) Ho: $p = 0$ persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* (X1) tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo.

Ha: $p \neq 0$ persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* (X1) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo.

(2) $H_0: \rho = 0$ persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan sanksi pajak (X_2) tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo.

$H_a: \rho \neq 0$ persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan sanksi pajak (X_2) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo.

Melalui hasil pengolahan data pada tabel 4.18 yaitu tabel hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai t-hitung untuk masing-masing variabel sebagai berikut.

(1) Variabel pelaksanaan *self assessment system* adalah sebesar -5,761.

Sedangkan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,025$) dan derajat bebas = 58 (60-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar 2,301. Karena nilai t-hitung (-5,761) lebih kecil dari t-tabel (-2,301), maka disimpulkan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat keterkaitan yang signifikan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas *self assessment system* dengan tindakan *tax evasion* sehingga terbukti bahwa koefisien regresi *self assessment system* adalah signifikan atau dengan kata lain pelaksanaan *self assessment system* berkaitan signifikan dengan *tax evasion* pada 60 wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Palopo.

(2) Variabel pelaksanaan sanksi pajak adalah sebesar -2,673.

Sedangkan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,025$) dan derajat bebas = 58 (60-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar 2,301. Karena nilai t-hitung (-2,673) lebih kecil dari t-tabel (-2,301), maka disimpulkan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , jadi

hasil pengujian menyimpulkan terdapat keterkaitan yang signifikan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion* sehingga terbukti bahwa koefisien regresi sanksi pajak adalah signifikan atau dengan kata lain pelaksanaan sanksi pajak berkaitan signifikan dengan *tax evasion* pada 60 wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Palopo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan *self assessment system* yang dimulai dari pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan SPT oleh wajib pajak sendiri, serta pelayanan dan pengawasan oleh fiskus belum berjalan baik. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan *Self Assessment System* berjalan cukup, tetapi ada beberapa hal yang pelaksanaannya sudah dianggap baik seperti pada proses pendaftaran dan pelayanan fiskus.
2. Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan sanksi pajak termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan sanksi pajak yang dimulai dari sanksi administrasi dan sanksi pidana belum berjalan baik.
3. Tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo termasuk dalam kategori cukup. Artinya ditinjau dari pelaporan SPT, kepemilikan nomor pokok wajib pajak, pelaksanaan wewenang oleh pihak ketiga selaku pemungut/pemotong pajak dan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih memiliki kesadaran yang cukup.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berkaitan signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada 60 wajib pajak orang pribadi Kota Palopo dan terdaftar pada KPP Pratama Palopo. Keterkaitan pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion* juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax evasion* selain dari pelaksanaan *self assessment system* adalah kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi dan pelayanan fiskus yang mengecewakan. Artinya semakin baik pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak maka akan membuat tindakan *tax evasion* rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak maka akan membuat tindakan *tax evasion* tinggi.

5.2 Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion*, maka diajukan beberapa saran yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Palopo yaitu sebagai berikut.

1. Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak masih kurang baik, oleh sebab itu sebaiknya KPP Pratama Palopo perlu meningkatkan intensitas dalam mengadakan sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan terpadu mengenai pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak agar masyarakat menjadi lebih sadar dan patuh dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Untuk proses pendaftaran sekiranya dilakukan kegiatan “jemput bola” untuk bekerja sama dengan perusahaan agar masyarakat lebih mudah memperoleh NPWP.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo juga bisa mengadakan kerja sama dengan perusahaan untuk melakukan pelatihan perhitungan pajak dan pengisian SPT yang dirasakan masih sulit. Mengenai penyetoran pajak dapat dilakukan penjemputan ke lokasi wajib pajak dengan syarat tertentu. Kemudian untuk pelayanan dan pengawasan dapat diberikan pendidikan dan pelatihan rutin kepada petugas pajak agar konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan bagi masyarakat, sebaiknya wajib pajak lebih menyadari akan pentingnya kepatuhan perpajakan sehingga upaya yang dilakukan fiscus sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat.
3. Tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Palopo yang memiliki kategori cukup, dalam artian wajib pajak masih memiliki kepatuhan yang rendah. Sebaiknya KPP Pratama Palopo menambah petugas di bagian pengawasan dan konsultasi untuk lebih memudahkan dalam mengawasi perilaku wajib pajak.
4. Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak memiliki kaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* maka diharapkan KPP Pratama Palopo memberikan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak, hal ini perlu dilakukan guna menekan tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana. dan Lilis, Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Prakti)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Anggoro, Toha. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Ilyas, W.B. dan Burton, R. 2008. *Hukum Pajak (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Latuperissa, Wanda. 2010. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Meminimalisasikan Tindakan Tax Evasion*. (<https://elib.unikom.ac.id> pengaruh persepsiwpop atas self assessment system terhadap tax evasion)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Pudyamoko, Y, Sri. 2008. *Pengantar Hukum Pajak (edisi revisi)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudijono, Anas. 2006. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi, Rezky. 2011. *Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System dalam keterkaitannya dengan Tindakan Tax Evasion pada KPP Paratama Bandung Cibeunying*. Majalah UNIKOM. (<https://elib.unikom.ac.id> persepsi self assessment system terhadap tax evasion).
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach (5th ed.)*. Great Britain: TJ International.
- Sularso, Sri. 2003. *Buku Pelengkap Metode Penelitian Akuntansi, Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia (Edisi 9)*. Jakarta: Salemba Empat.

Literatur Lain:

Daftar Pegawai KPP Pratama Palopo pada tahun 2014.

Daftar wajib pajak pada KPP Pratama Palopo yang terdaftar tahun 2013.

Harian Seputar Indonesia. Thursday, 26 May 2011. ***KPP Pratama Palopo Temukan Ratusan Pengemplang Pajak***. (diakses tanggal 2 April 2014).

<http://konsultan-pajak.co.cc> caris-aviantara. blogspotaviantara. smultiply (diakses tanggal 3 April 2014)

[http://www. social-sciences](http://www.social-sciences) rancangan penelitian. (diakses tanggal 3 April 2014)

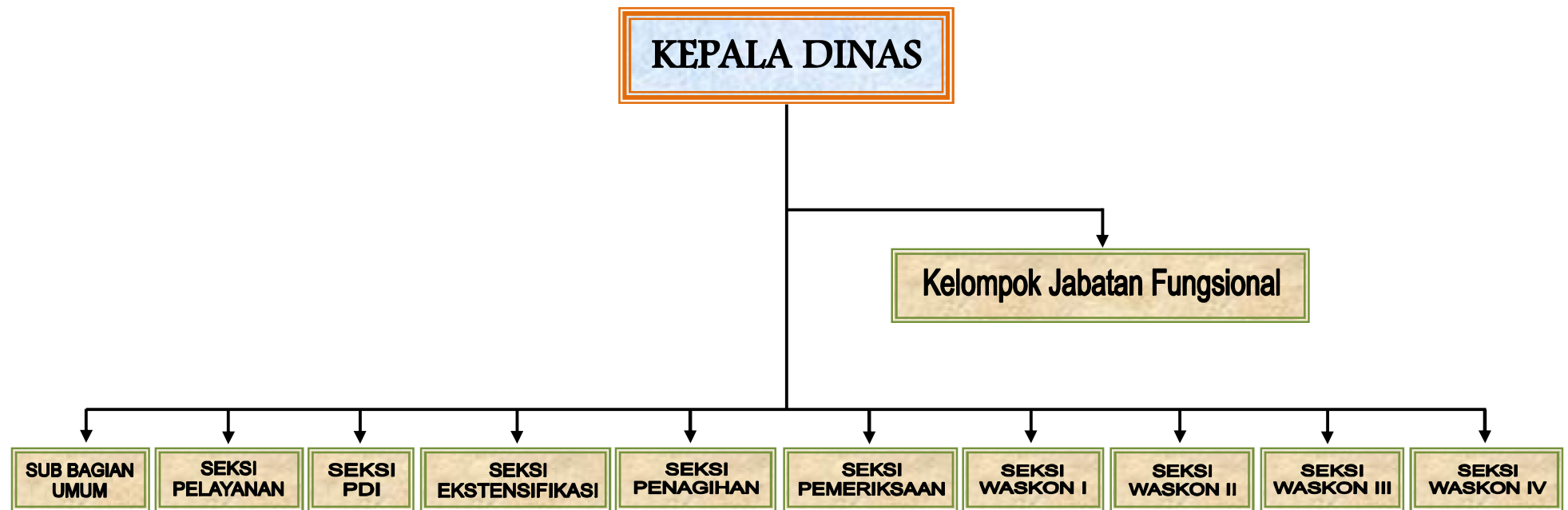
[http://blogkatte. blogspot.com](http://blogkatte.blogspot.com). 2009. menentukan instrumen penelitian. html. (diakses tanggal 3 April 2014)

[http://www. Pajak. go.id](http://www.Pajak.go.id) (diakses tanggal 10 April 2014)

Profil KPP Pratama Palopo. 2013. Palopo: KPP Pratama Palopo.

[www. Pajak. go.id](http://www.Pajak.go.id) (diakses tanggal 10 April 2014)

Lampiran 1 : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PALOPO



Lampiran 2 :Daftar Responden Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Palopo

NO	Responden	Jenis Usaha	JK	Pend. Terakhir	Umur
1	ISAK	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	L	SMA	37
2	NAIM H	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	L	S1	38
3	BENNY ANDE	KEDAI MAKANAN	L	S1	30
4	JORIS LINDAYAL	KEDAI MAKANAN	L	SMA	49
5	YAMIN ONGALIA	KEDAI MAKANAN	L	SMA	41
6	NURBAYA	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	P	S1	29
7	HASNA	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	P	SMA	40
8	M A R D I N	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	L	SMA	37
9	JAYUS	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	L	D3	28
10	MAHMUD M.	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	L	S1	48
11	IR.MUHAJIR (UD.MULTI BISNIS)	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	L	SMA	31
12	EDDY TANA LISA	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	L	SMA	43
13	AMBO SENGNGENG,H	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	L	SMK	34
14	EDDY HERMANTO	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	L	S1	37
15	MUSLIMIN (TK.SERBA MURAH)	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	D3	36
16	RISAL	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	SMA	47
17	SITTI AHMAD	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	P	SMK	35
18	KAMALUDDIN	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	L	SMP	43
19	ARIEF	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	L	SMA	31
20	ARSYAD.M	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	L	SMK	49
21	MUH. KARYADI	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA	L	SMA	26
22	ADNAN LATIF	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	L	D3	29

23	HERMAN	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	L	S1	38
24	SUHANNAS	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	L	SMA	46
25	HAFID.H	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	L	SMA	27
26	SADAHIR NANSA M.H.	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	L	SMP	40
27	ROMI RUSLI	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	L	D3	32
28	ARIANI	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	P	SMK	41
29	JEFRI LISAL LIE	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	L	S1	52
30	RAMLAH B.HAJI	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM	P	SMA	35
31	DAHLAN	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	SMP	53
32	FENNY LINTING	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	P	S1	34
33	HENRY AGNES	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	SMA	41
34	ASKAR ARIS	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	L	SMA	49
35	HAMID ABD	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	SMP	44
36	YULIA WIJAYA	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	P	SMA	29
37	NY.FATIMAH HUSAIN	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM	P	D3	47
38	HAMZAH	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	L	S1	42
39	ROY KURNIAWAN	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	L	D3	37
40	AMIR SAKE	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	SMA	41
41	DOYO MOLIS	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	L	S1	32
42	PATIA	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	P	D1	28

43	RUSLIE	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	SMA	43
44	PARIDA IDAWATI	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	P	S1	47
45	ASIS ABDUL A	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	L	SMA	48
46	KAMALUDDIN	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	L	SMA	32
47	USMAN	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	L	S1	27
48	HASRIANI DJAMALUDDIN	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	P	SMA	43
49	HENDRO	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	L	D3	30
50	BAENAH HAJI	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	L	SMA	32
51	NOER MOEH H.S	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	L	S1	35
52	NASRUDDIN (MENTARI)	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	L	D3	40
53	JABBAR HAMSENG SH,	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	L	SMA	28
54	YULIANA JABBAR	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	P	SMA	27
55	NIHAYA DRA.	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	P	S1	43
56	ARDI	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	L	SMA	29
57	DENY PURNAMA PAYUNG	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	L	S1	39
58	FREDY IRAWAN	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	L	S1	27
59	HAJI ANWAR S	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	L	SMA	26
60	LATHIPAH	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	P	SMA	44
TOTAL			60		

Lampiran 3 :Daftar Responden Fiscus KPP Pratama Palopo

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pend. Terakhir	Jabatan	Unit Kerja	Masa Bakti
1	Muh. Subhan	L	28	D1	Pelaksana	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	8
2	Gunawan Sudiharto	L	37	S2	Kepala Subbag	SubBagian Umum	12
3	Sukmawati	P	50	SMA	Pelaksana	SubBagian Umum	29
4	Darmawan Ilham	L	24	D3	Pelaksana	SubBagian Umum	2
5	Willy	L	24	D3	Pelaksana	SubBagian Umum	1
6	Erick Mual	L	29	D1	Sekretaris	SubBagian Umum	10
7	Yuli Pratiwi Pujilestari	P	28	D3	Bendahara	SubBagian Umum	
8	Abdul Rahman Ali	L	54	S1	Kepala Seksi	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	29
9	Burhanuddin	L	52	S2	Pelaksana	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	29
10	Hasmawati Umar	P	47	SMA	Pelaksana	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	20
11	Hamsidah	P	49	SMA	Pelaksana	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	17
12	Sulsiah	P	46	SMA	Pelaksana	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	17
13	Nur Arianto	L	29	D3	Pemeriksa Pajak Pelaksana		10
14	Eko Briyan Nasution	L	27	D1	Operator Console	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	7
15	Bokko Sakke	L	55	SMA	Kepala Seksi	Seksi Pelayanan	32
16	Luther Lobo	L	54	SMA	Pelaksana	Seksi Pelayanan	33
17	Andini Febriany	P	29	S1	Pelaksana	Seksi Pelayanan	4
18	Mustakim	L	34	S2	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	14
19	Muh. Yusuf	L	50	SMA	Pelaksana	Seksi Pelayanan	17
20	Suardi Iskandar	L	29	D3	Pemeriksa Pajak Pelaksana		11

21	Ridwan Pajriyansyah	L	24	D3	Pelaksana	Seksi Pelayanan	2
22	Bayu Satriyo Wicaksono	L	25	D3	Pelaksana	Seksi Pelayanan	2
23	Charles Yoseph. Ch. Tilis	L	30	D1	Pelaksana	Seksi Pelayanan	10
24	Muhammad Nur Akbar	L	29	D1	Pelaksana	Seksi Pelayanan	7
25	Sri Hastuti Bandaso	P	21	D1	Pelaksana	Seksi Pelayanan	1
26	Simon Mussung	L	55	SMA	Kepala Seksi	Seksi Penagihan	32
27	Marten	L	41	SMA	Pelaksana	Seksi Penagihan	17
28	Sophan Bayu Ariyadi	L	29	D3	Pemeriksa Pajak Pelaksana		7
29	Andi Suloraja Saddawero	L	31	S1	Pelaksana	Seksi Penagihan	11
30	Hariadi	L	27	D3	Pelaksana	Seksi Penagihan	8
31	Hamsin Hamude	L	55	S1	Kepala Seksi	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	32
32	Hisma	P	39	SMA	Pelaksana	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	17
33	Harun Setiawan	L	24	D3	Pelaksana	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	2
34	Rafni	P	54	S1	Kepala Seksi	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	33
35	Michael Thecy	L	43	SMA	Pelaksana	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	17
36	Moch. Faisol	L	23	D3	Pelaksana	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	1
37	Munawir	L	28	D1	Pelaksana	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	8
38	Frans Pasamboan	L	54	SMA	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	33
39	Safruddin	L	33	S1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	14
40	Kusnandar	L	41	S2	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	19
41	Wahidah	P	45	S1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	17
42	Hasan	L	51	S1	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	29
43	Indra Asaad	L	35	S1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	14

44	Jusman K	L	26	D3	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	4
45	Muhammad Sabri AR	L	26	D3	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	4
46	Abdul Rahman Ahmad	L	54	S1	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	29
47	Alpha Yustikano Marganaputra	L	28	D3	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	7
48	Yerniati	P	47	S1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	20
49	Azwar Munas	L	29	D3	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	10
50	Andi Akhsan Putra,SE	L	34	S2	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	14
51	Andik Setyo Hariadi	L	29	D3	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	7
52	Akhmad Ridha Djamaluddin	L	27	D3	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	5
53	Mustakim	L	34	S2	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	14
54	Adi Indra Kurniawan	L	30	S1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	5
55	Wiwi Gunarti Sunarwan	P	43	S1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	17
56	Ariandy	L	30	S1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	11
57	Aswar	L	37	S1	Pemeriksa Pajak Lanjutan		16
58	Subair	L	32	D1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	14
59	Ari Putra	L	27	D3	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	
60	Nur Alamsyah	L	32	D1	Account Representative	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	12
JUMLAH RESPONDEN						60 ORANG	

Lampiran 4 : Kuesioner



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Lampiran : Kuesioner penelitian

Perihal : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian

Kepada Yth

Bapak/Ibu Petugas Pajak

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan *TaxEvasion*”**, maka dibutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas peneliti :

Nama : Dwi Indryani

NIM : A31110303

Program studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini kemungkinan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat, namun dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan, semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang peneliti sedang susun, dan kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin oleh peneliti.

Atas perhatian serta kerja sama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Dwi Indryani P.

IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama Responden :(Boleh diisi atau tidak)
- b. Nomor Responden :(Diisi oleh peneliti)
- c. Umur :Tahun
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
- e. Jabatan :
- f. Lama Bekerja :Tahun
- g. Pendidikan Terakhir :

*) Coret Yang Tidak Perlu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan *TaxEvasion*. Mohon Bapakberilah tanda silang (X) pada kotak jawaban yang dianggap tepat.

Daftar Kuisisioner Untuk Variabel X
 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi
 Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak

A. Self Assessment System (Rezky Suhairi, Tahun 2011).

• **Indikator : Mendaftar**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang proses memperoleh NPWP?
 - a. Sangat rumit
 - b. Rumit
 - c. Biasa saja
 - d. Mudah
 - e. Sangat mudah
2. Berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan NPWP?
 - a. >1 bulan
 - b. < 2 minggu
 - c. < 1 minggu
 - d. < 1 hari
 - e. <1 jam
3. Mengapa Bapak/Ibu memiliki NPWP?
 - a. Terpaksa
 - b. Untuk menghindari sanksi
 - c. Hanya ikut-ikutan saja
 - d. Mentaati ketentuan yang berlaku
 - e. Kesadaran diri selaku warga negara yang baik

• **Indikator : Menghitung**

4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang proses perhitungan pajak?
 - a. Sangat rumit
 - b. Rumit
 - c. Biasa saja
 - d. Mudah
 - e. Sangat mudah
5. Kapan Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru, misalnya mengenai perubahan tarif / PTKP / batas PKP?
 - a. Tidak pernah tahu
 - b. Saat mengurus pajak tapi setelah diberitahu petugas
 - c. Saat mengurus pajak dan menanyakannya kepada petugas
 - d. Saat akan mengurus pajak
 - e. Setiap perubahan terbaru selalu mengikuti

6. Setelah mengetahui peraturan perpajakan terbaru, apakah Bapak/Ibu sudah dapat melaksanakannya?
 - a. Tidak ingin mengikuti / berpura-pura tidak tahu
 - b. Belum karena menunggu yang lain terlebih dahulu
 - c. Belum karena hanya mengetahui tapi tidak mengerti
 - d. Sudah meski masih terdapat sedikit kesalahan
 - e. Sudah melakukan sesuai dengan ketentuan
7. Dari mana Bapak/Ibu dapat mengetahui peraturan terbaru?
 - a. Pemberitahuan setelah SPT dilaporkan
 - b. Diberitahu petugas saat pengurusan pajak
 - c. Konsultan pajak
 - d. Media massa
 - e. Cari informasi sendiri

• **Indikator : Membayar**

8. Kapan Bapak/Ibu biasa menyetorkan pajak?
 - a. Selalu di batas terakhir penyetoran
 - b. Menjelang akhir batas waktu penyetoran
 - c. Saat perhitungan selesai dilakukan
 - d. Pertengahan batas waktu penyetoran
 - e. Selalu di awal waktu penyetoran
9. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan tempat penyetoran pajak?
 - a. Terbatas sehingga menyulitkan
 - b. Kurang menunjang
 - c. Pas-pasan
 - d. Tersedia namun pelayanannya kurang maksimal
 - e. Memudahkan dan membantu wajib pajak

• **Indikator : Melapor**

10. Siapa yang melakukan proses perhitungan & pelaporan pajak Bapak/Ibu?
 - a. Petugas pajak
 - b. Kerabat
 - c. Calo
 - d. Konsultan pajak
 - e. Sendiri
11. Kapan Bapak/Ibu biasa melaporkan SPT?
 - a. Selalu di batas terakhir pelaporan
 - b. Menjelang akhir batas waktu pelaporan
 - c. Saat perhitungan selesai dilakukan
 - d. Pertengahan batas waktu pelaporan
 - e. Selalu di awal waktu pelaporan
12. Dari mana Bapak/Ibu dapat mengetahui batas waktu penyampaian SPT?
 - a. Tidak pernah tahu
 - b. Konsultan pajak
 - c. Media massa
 - d. Sosialisasi petugas
 - e. Cari informasi sendiri

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan tempat pelaporan pajak (KPP)?
 - a. Terbatas sehingga menyulitkan
 - b. Kurang memadai
 - c. Biasa saja
 - d. Tersedia namun pelayanannya kurang maksimal
 - e. Memudahkan dan membantu wajib pajak

• **Indikator : Pelayanan fiskus**

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan petugas dalam mengurus pajak?
 - a. Makin membingungkan
 - b. Tetap saja membuat bingung
 - c. Biasa saja
 - d. Sedikit membantu
 - e. Sangat membantu
15. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu atau kerabat Bapak/Ibu mengenai pelayanan petugas pajak?
 - a. Terdapat petugas yang berusaha membohongi wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi
 - b. Petugas pajak menawarkan solusi untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan maksud sama-sama memperoleh keuntungan
 - c. Petugas pajak menerima saja jika ada tawaran untuk melakukan manipulasi pajak terutang
 - d. Selama ini tidak ada kendala yang berarti
 - e. Petugas pajak konsisten melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun dijanjikan mbalan materi

• **Indikator : Pengawasan**

16. Pemeriksaan perhitungan pajak oleh petugas pajak dilaksanakan sesuai ketentuan....
 - a. Sangat tidak yakin
 - b. Tidak yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Yakin
 - e. Sangat yakin
17. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengenaan sanksi yang diterapkan selama ini?
 - a. Tidak sesuai dengan yang seharusnya
 - b. Percuma saja karena wajib pajak masih tetap membandel
 - c. Biasa saja
 - d. Sudah sesuai ketentuan tapi belum sepenuhnya efektif
 - e. Memberikan efek jera

B. Sanksi Pajak (Wanda Latuperissa, Tahun 2010)

• Indikator: Sanksi Administrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Jika dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku?
 - a. Sangat setuju, karena dalam pengisian SPT yang tidak benar, maka Wajib Pajak telah menutup-nutupi kecurangan dalam pembayaran pajak terhutangnya
 - b. Setuju, karena pengisian SPT dengan benar dan lengkap telah Membantu aparat pajak dalam menanggulangi Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari pembayaran pajak
 - c. Kadang-kadang, Wajib Pajak tidak memahami petunjuk dalam pengisian SPT
 - d. Tidak setuju, karena apabila terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPT maka aparat pajaklah yang akan dikenakan sanksi
 - e. Sangat tidak setuju, karena dalam pengisian SPT yang tidak benar merupakan kecerobohan aparat pajak dalam memonitoring Wajib Pajak
2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pembayaran pajak atau penyetoran pajak udah dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo, dan dalam hal penundaan pembayaran pajak juga akan dikenakan sanksi?
 - a. Sangat setuju, karena dalam pembayaran/penyetoran pajak harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak dikenakan sanksi
 - b. Setuju, karena batas waktu pembayaran/penyetoran pajak telah diatur dalam KUP untuk semua masa pajak
 - c. Kadang-kadang, Wajib Pajak lupa dalam pembayaran/penyetoran pajaknya
 - d. Tidak setuju, karena dalam pembayaran/penyetoran pajak tidak diberitahukan batas waktu pembayaran pajak
 - e. Sangat tidak setuju, karena tidak diatur dalam KUP yang berlaku
3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan untuk seluruh masa pajak, memberatkan anda
 - a. Sangat setuju, karena walaupun sanksi tersebut tidak terlalu besar tetapi dapat memberatkan Wajib Pajak apabila jumlah pajak terhutangnya besar
 - b. Setuju, karena ketentuan tersebut telah diatur dalam KUP
 - c. Kadang-kadang, pengenaan sanksi tersebut tidak selalu memberatkan Wajib Pajak
 - d. Tidak setuju, karena tergantung pada Wajib Pajaknya sendiri apakah tidakannya dapat dijatuhkan hukuman/sanksi
 - e. Sangat tidak setuju, karena tidak semua masa pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%

4. Menurut Bapak/Ibu, Pada saat pemeriksaan Wajib Pajak terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak terhutangnya maka akan diterbitkannya SKPKB serta ditambah dengan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajak, apakah memberatkan anda
 - a. Sangat setuju, karena pengenaan sanksi sebesar 100% memberatkan/tidak memberatkan tergantung Wajib Pajak yang menyingkapinya
 - b. Setuju, karena pengenaan sanksi yang berat ini dapat membuat efek jera bagi Wajib Pajak yang terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak
 - c. Kadang-kadang, Wajib Pajak dan Fiskus terjadi kesalahpahaman dalam melakukan pemeriksaan
 - d. Tidak setuju, karena pengenaan sanksi tersebut terlalu besar untuk Wajib Pajak
 - e. Sangat tidak setuju, karena penerbitan SKPKB tidak ditentukan dalam KUP yang berlaku
5. Menurut Bapak/Ibu, diterbitkannya SKPKB, maka Wajib Pajak tidak menambah sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak
 - a. Sangat setuju, karena penambahan sanksi sebesar 100% tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang jumlah pajaknya kurang bayar
 - b. Setuju, karena penerbitan SKPKB tidak untuk pengurangan jumlah pajak
 - c. Kadang-kadang, Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan yang berlaku
 - d. Tidak setuju, karena Wajib Pajak diharuskan untuk membayar sanksinya sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak
 - e. Sangat tidak setuju, karena penambahan sanksi sebesar 100% merupakan salah satu alternatif Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya

• **Indikator: Sanksi Pidana**

6. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan adanya sanksi pidana akan menurunkan tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
 - a. Sangat setuju, ancaman/sanksi pidana sangat berat bagi Wajib Pajak karena dapat dijatuhkan hukuman penjara/kurungan bagi Wajib Pajak
 - b. Setuju, karena hukuman/sanksi yang akan diberikan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya
 - c. Kadang-kadang, ancaman/sanksi pidana dapat digantikan dengan sanksi denda atau bunga
 - d. Tidak setuju, karena dengan dijatuhkan sanksi pidana pun masih banyak Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajibannya sebagai wajib pajak
 - e. Sangat tidak setuju, karena tidak perlu dikenakan sanksi pidana

7. Menurut Bapak/Ibu, Dengan adanya sanksi pidana akan menambah presentase tindakan Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak
 - a. Sangat setuju, karena dengan adanya sanksi pidana pun tidak membuat efek jera bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyelundupan pajak
 - b. Setuju, karena Wajib Pajak bisa menutupi setiap tindakannya dalam menyelundupkan pajak
 - c. Kadang-kadang, antara Wajib Pajak dan aparat pajak seringkali melakukan kerjasama untuk menutupi perbuatannya
 - d. Tidak setuju, malah dengan adanya sanksi ini akan mengurangi tingkat penyelundupan pajak
 - e. Sangat tidak setuju, karena tergantung dari sudut mana menyingkapi sanksi tersebut

DAFTAR KUESIONER UNTUK VARIABEL Y
TINDAK *TAX EVASION*

(Rezky Suhairi, Tahun 2011).

• **Indikator : Tidak menyampaikan SPT**

1. Bagaimana perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT?
 - a. Tidak menyampaikan dengan sengaja walaupun sudah dihimbau petugas
 - b. Tidak menyampaikan dengan sengaja
 - c. Tidak menyampaikan karena ketidaksengajaan
 - d. Menyampaikan setelah dihimbau petugas
 - e. Sudah banyak yang menyampaikan tanpa himbauan petugas
2. Apa yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT?
 - a. Memang berniat menggelapkan pajak
 - b. SPT telah diisi namun tidak dulu dilaporkan karena mencoba peruntungan seandainya tidak diketahui
 - c. Ragu-ragu
 - d. Lupa
 - e. Wajib pajak telah mengurusnya melalui konsultan tapi konsultannya tidak benar

• **Indikator : Menyampaikan SPT dengan tidak benar**

3. Apakah SPT yang disampaikan wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kenyataan pembukuannya (melaporkan sebenarnya)?
 - a. Tidak sesuai dengan merekayasa keseluruhan laporan keuangan
 - b. Tidak sesuai dengan mengubah bagian tertentu pada laporan keuangan
 - c. Hanya sebagian yang sesuai karena ketidaksengajaan
 - d. Hampir mendekati
 - e. Sudah sesuai dengan ketentuan
4. Bagaimana dengan tindakan wajib pajak yang memiliki jabatan/kekuasaan di pemerintahan?
 - a. Melakukan upaya penggelapan pajak
 - b. Tidak memenuhi kewajibannya karena menunggu permintaan petugas
 - c. Melakukan kewajibannya karena dipublikasikan
 - d. Memenuhi kewajibannya saat diminta petugas
 - e. Menjadi tauladan bagi rakyatnya dengan mematuhi ketentuan

• **Indikator : Tidak mendaftarkan/menyalahgunakan NPWP**

5. Masih banyak masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak tetapi belum menjadi wajib pajak...
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

6. Kenapa masih terdapat masyarakat yang tidak ingin menjadi wajib pajak?
 - a. Sengaja untuk tidak membayar pajak
 - b. Kekurangsadaran masyarakat
 - c. Pengaruh lingkungan sekitar
 - d. Kekurangpatuhan masyarakat
 - e. Tidak mengetahui kewajibannya
7. Bagaimana wajib pajak dalam penggunaan NPWP / Surat Pengukuhan PKP?
 - a. Sering menyalahgunakannya
 - b. Kadang terjadi penyalahgunaan
 - c. Ragu-ragu
 - d. Sedikit terjadi penyalahgunaan
 - e. Menggunakannya sesuai ketentuan

• **Indikator: Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong**

8. Bagaimana dengan tindakan wajib pajak selaku pemungut/pemotong dalam melaporkan pajaknya?
 - a. Tidak melaporkan
 - b. Melaporkan sebagian dengan sengaja
 - c. Ragu-ragu
 - d. Melaporkan sebagian karena ketidaksengajaan
 - e. Melaporkan yang seharusnya
9. Apa yang membuat pemungut/pemotong tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong?
 - a. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
 - b. Lalai menjalankan tugasnya
 - c. Ragu-ragu
 - d. Lupa
 - e. Telah disetorkan dengan menitipkan pada pihak lain sehingga ada kemungkinan disalahgunakan pihak lain tadi

• **Indikator: Berusaha menyuap fiskus**

10. Terdapat wajib pajak yang berusaha menyuap petugas.....
 - a. Sangat banyak
 - b. Banyak
 - c. Ragu-ragu
 - d. Sedikit
 - e. Sangat sedikit
11. Tindakan/modus apa yang dilakukan wajib pajak dalam usahanya melakukan penyuapan?
 - a. Secara langsung mengatakannya/terang-terangan
 - b. Melalui makelar
 - c. Memberikan berbagai macam hadiah/kenikmatan lainnya
 - d. Kurang tahu karena jarang terjadi
 - e. Tidak pernah ada